

**ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK DAERAH DAN LABA BUMD
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH**
Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten Boyolali

Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Program Studi Akuntansi



Oleh:

Arif Nugroho Rachman

NIM: 022114132

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
YOGYAKARTA
2007**

SKRIPSI

**ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK DAERAH DAN LABA BUMD
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH
Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten Boyolali**

Oleh:
Arif Nugroho Rachman

NIM: 022114132

Telah disetujui oleh:

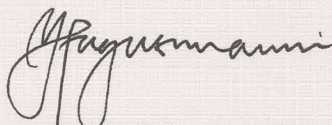
Pembimbing I



Drs. Y.P. Supardiyono, M.Si, Akt

tanggal 30 Januari 2007

Pembimbing II



Dra. YFM. Gien Agustinawansari, M.M, Akt

tanggal 1 Februari 2007

SKRIPSI

ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK DAERAH DAN LABA BUMD TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten Boyolali

Dipersiapkan dan ditulis oleh

Arif Nugroho Rachman
NIM: 022114132

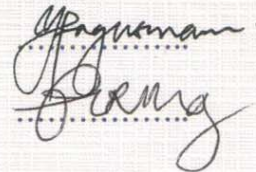
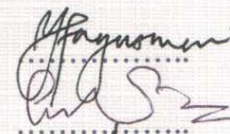
Telah dipertahankan di depan Panitia Penguji
Pada tanggal 21 Februari 2007
Dan dinyatakan memenuhi syarat

Susunan Panitia Penguji

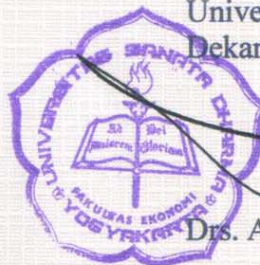
Nama lengkap

- Ketua : Dra. YFM. Gien Agustinawansari, M.M., Akt
Sekretaris : Lisia Apriani, S.E., M.Si, Akt
Anggota : Drs. Y.P. Supardiyono, M.Si., Akt
Anggota : Dra. YFM. Gien Agustinawansari, M.M., Akt
Anggota : Firma Sulistiyowati, S.E., M.Si.

Tanda tangan



Yogyakarta, 28 Februari 2007
Fakultas Ekonomi
Universitas Sanata Dharma
Dekan




Drs. Alex Kahu Lantum M.S.

MOTTO:

"JALANI HIDUP INI APA ADANYA DENGAN
BELAJAR DAN BERDOA"

*Tuhan tidak akan merubah nasib hambanya kecuali
hambanya itu sendiri yang mau berubah dan kegagalan
bukanlah akhir dari segalanya tapi awal dari suatu
kesuksesan.*

SKRIPSI INI KU PERSEMBAHKAN UNTUK:

*Ayahanda Abdul Rachman dan Ibunda Sunarmi Tercinta
Adikku Lina, Erna, terima kasih atas dukungan dan doanya
Pakdheku Alm. Muhammad Djaeni sekalian
Eyangku Alm. Amad Asmuri sekalian dan Alm. Mitrowiguna Sekalian
Calon Istriku nanti.*

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini tidak memuat karya atau bagian karya orang lain, kecuali yang telah disebutkan dalam kutipan dan daftar pustaka, sebagaimana layaknya karya ilmiah.

Yogyakarta, 28 Februari 2007



Arif Nugroho Rachman

ABSTRAK

ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK DAERAH DAN LABA BUMD TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten Boyolali

**Arif Nugroho Rachman
022114132
Universitas Sanata Dharma
Yogyakarta
2007**

Penelitian ini bertujuan mengetahui (1) Besar kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Boyolali, (2) besar tingkat kontribusi laba BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah di kabupaten Boyolali, dan (3) tingkat pertumbuhan kontribusi dari sektor Pajak Daerah dan laba BUMD di Kabupaten Boyolali

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi, sedangkan teknik analisis data dilakukan dengan teknik analisis data kuantitatif. Analisis data kuantitatif digunakan untuk menghitung tingkat kontribusi Pajak Daerah, laba BUMD, dan tingkat pertumbuhan kontribusi dari sektor Pajak Daerah serta laba BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Hasil analisis data menunjukkan bahwa (1) Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Boyolali, sebesar 16,91% pada tahun 2001; 17,72% pada tahun 2002; 17,76% pada tahun 2003 dan 19,59% pada tahun 2004; sedangkan pada tahun 2005 terjadi penurunan drastis sebesar -5,54%; menjadi 14,02%; (2) kontribusi laba BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Boyolali, sebesar 1,53% tahun 2001; 1,29% pada tahun 2002; dan 1,03% pada tahun 2003. Mulai naik menjadi sebesar 1,39% pada tahun 2004 dan 6,88% pada tahun 2005, (3) tingkat pertumbuhan kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah cenderung naik dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2004, dan turun pada tahun 2005. Tingkat pertumbuhan kontribusi laba BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah cenderung turun dari tahun 2001 sampai tahun 2003, dan mulai naik dari tahun 2004 sampai tahun 2005.

ABSTRACT

AN ANALYSIS ON THE CONTRIBUTION REGIONAL TAX AND BUMD GAIN TO REGIONAL ORIGINAL ORIGINAL REVENUE A Case Studi at Regional Government of Boyolali Regency

Arif Nugroho Rachman
022114132
Universitas Sanata Dharma
Yogyakarta
2007

This research is aim to know: (1) The amount of contribution Regional tax to Regional Original Revenue in Boyolali Regency, (2) The contribution level of BUMD gain to Regional Original Revenue in Boyolali Regency, and (3) The growth rate of contribution from sector Regional tax and BUMD gain in Boyolali Regency.

The techniques of data gathering to do with Interview and documentation, while the data analysis technique to do with kuantitatif data analysis. Kuantitatif data analysis used for computation kontribusi Regional tax, BUMD gain and growth contribution level from sector Regional tax and BUMD gain to Regional Original Revenue.

The results of analysis of the data shows that (1) The contribution Regional tax to Regional Original Revenue Boyolali Regency; is 16,91% at 2001, 17,72% at 2002, 17,76% at 2003 and 19,59% at 2004 while in the year 2005 there was a drastic decresion for -5,54% become 14,02%. (2) BUMD gain contribution to Regional Original Revenune Boyolali Regency; is 1,53% at 2001; 1,29% at 2002; and 1,03% at 2003. Start to increasae for 1,39% at 2004 and 6,88% at 2005, (3) Growth contribution level of regional tax tend to raise from 2001 up to 2004, and decreasing at 2005. Growth contribution level of BUMD gain to Regional Original Revenue tend to decrease from 2001 up to 2003, and start to increase from 2004 up to 2005.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur atas kehadiran Allah Swt, atas berkat, rahmat dan kasih sayangNya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK DAERAH DAN LABA BUMD TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN BOYOLALI”, studi kasus pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Boyolali. Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana ekonomi pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.

Atas keberhasilan dalam penyelesaian skripsi ini penulis tidak terlepas dari bantuan, dukungan dan kerjasama dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah Swt, Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, atas segala anugerah dan kasih sayang dalam penulisan skripsi ini.
2. Dr. Ir. P. Wiryono P. S. J., selaku Rektor Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.
3. Drs. Alex Kahu Lantum, M.S., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.
4. Ir. Drs. Hansiadi Yuli Hartanto, M.Si., Akt, selaku Ketua Jurusan Akuntansi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.
5. Drs. Y.P. Supardiyono, M.Si., Akt, selaku pembimbing I yang telah memberikan pengarahan dan masukan dalam penulisan skripsi ini.

6. Dra. YFM. Gien Agustinawansari, M.M., Akt, selaku pembimbing II yang telah memberikan pengarahan dan masukan dalam penulisan skripsi ini.
7. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma yang telah memberikan pengarahan serta pengetahuan dalam proses perkuliahan selama penulis kuliah hingga penulisan skripsi ini.
8. Sugeng, SE, M.M., Sri Rahayu beserta staf Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Boyolali yang telah membantu penulis selama melakukan penelitian dan penulisan skripsi ini.
9. Wiyata beserta staf Kesbang dan Linmas Kabupaten Boyolali atas pemberian ijin dan pengarahan selama penulisan skripsi ini.
10. Indra Yulianto, SH, beserta Staf Perekonomian Kabupaten Boyolali yang telah membantu dalam memperoleh data selama penulis melakukan penelitian dan penulisan skripsi ini.
11. Tejo beserta staf Badan Pusat Statistik Boyolali atas bantuan dan ijin penulis dalam mencari data selama penulisan skripsi.
12. Seluruh Staf Dinas Pariwisata Kabupaten Boyolali yang telah membantu mencarikan data selama proses penulisan skripsi ini.
13. Ayahanda dan Ibunda beserta adik-adikku tercinta yang telah memberikan dukungan doa, materil, moral, dan spiritual untuk memotivasi penulis selama menyelesaikan skripsi ini.
14. Keluarga besar Alm.Amad Asmuri di Boyolali dan Salatiga beserta keluarga besar Alm. Mitrowiguno di Wonogiri, Solo dan Semarang, terima kasih doa dan dukungannya selama penulis melakukan skripsi.

15. Temanku Adien terima kasih atas pinjaman komputernya, dan anak-anak kost Pandawa, Wiwid atas dukungan selama melakukan penulisan skripsi.
16. Radit, Jumbo, Yati dan dedek Yani tercinta, Terima kasih atas bantuan *Back up* datanya waktu penulis kehilangan data, serta doa dan dorongan waktu penulis lagi *down* dalam penulisan skripsi ini.
17. Anak-anak Akuntansi'02 kelas C Bagus, Gatot, Dhean, Nanto, Alvon, Yudha, Michael, Wawan, Wambi, Purwanti, Nita, Era, Acidz, Irwan Akt'00, Roseva Akt'99, Ayu Man'03, Iin, Tukul Man'03, Ayoe PBSID'05, Taufik Sing'04. Terima kasih atas inspirasi, masukan, dan diskusinya selama melakukan penulisan skripsi.
18. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu dari proses perkuliahan sampai penulisan skripsi ini selesai.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari masih banyak kekurangan dan kesalahan, sehingga masih di harapkan masukan dari berbagai pihak. Semua itu semata-mata hanya untuk kesempurnaan dalam penulisan karya tulis ini.

Yogyakarta, 28 Februari 2007



Arif Nugroho Rachman

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GRAFIK.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	4
E. Sistematika Penulisan	5
BAB II LANDASAN TEORI.....	7
A. Pajak.....	7
1. Pengertian Pajak.....	7
2. Fungsi Pajak.....	7
3. Teori yang mendasari pembenaran atas pemungutan pajak..	7
4. Sistem pemungutan pajak	8
B. Sumber-sumber Pendanaan Pelaksanaan Pemerintah Daerah	9
1. Pendapatan Asli Daerah	9
2. Dana Perimbangan	10
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	11
4. Pinjaman Daerah	12
C. BUMD.....	13
1. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat P.D. Bank Pasar	14
2. Perusahaan Daerah Bank P.D. BPR BKK	15
3. Perusahaan Daerah Aneka Karya.....	18
4. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).....	19
D. Istilah-istilah dalam Pemerintah Daerah yang sesuai dengan UU No.5 tahun 1974 yang di beri penegasan.....	22
E. Kontribusi.....	23
F. Pajak Daerah	24
G. Penelitian-penelitian sebelumnya yang melandasi topik	28

BAB III METODE PENELITIAN	29
1. Jenis Penelitian.....	29
2. Waktu dan tempat penelitian.....	29
3. Teknik pengumpulan data.....	29
4. Teknik analisis data.....	29
 BAB IV GAMBARAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI	 34
A. Letak Geografis.....	34
1. Jenis Tanah.....	34
2. Struktur Tanah.....	35
3. Topografi.....	35
4. Gunung.....	36
5. Perairan	36
6. Bahan Tambang	37
7. Luas Wilayah	37
B. Pemerintahan.....	37
C. Penduduk.....	38
D. Pertanian.....	39
E. Industri	40
F. Keuangan	41
1. Pendapatan Asli Daerah	41
2. Pendapatan dari sektor Pariwisata.....	43
 BAB V ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN	 45
A. Deskripsi Data.....	45
B. Analisis Data	47
1. Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah... ..	47
2. Kontribusi Laba Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) terhadap Pendapatan Asli Daerah	50
3. Tingkat pertumbuhan kontribusi Sektor Pajak Daerah dan laba BUMD periode 2001 sampai dengan 2005	53
C. Pembahasan.....	59
 BAB VI PENUTUP	 62
A. Kesimpulan	62
B. Keterbatasan Penelitian.....	63
C. Saran.....	64
 DAFTAR PUSTAKA	 66
 LAMPIRAN.....	 68
 DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	 95

DAFTAR TABEL

	Halaman
1. Tabel III.4.a.....	30
2. Tabel III.4.b.....	30
3. Tabel III.4.c.....	32
4. Tabel III.4.d.....	33
5. Tabel IV.1.a.....	42
6. Tabel IV.1.b.....	42
7. Tabel IV.1.c.....	42
8. Tabel IV.1.d.....	43
9. Tabel IV.1.e.....	43
10. Tabel IV.2.....	44
11. Tabel V.1.a.....	46
12. Tabel V.1.b.....	46
13. Tabel V.1.c.....	47
14. Tabel V.2.a.....	49
15. Tabel V.2.b.....	51
16. Tabel V.2.c.....	56
17. Tabel V.2.d.....	59

DAFTAR GRAFIK

	Halaman
1. Contoh Grafik III.4.....	31
2. Grafik V.1.	52

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
1. Lampiran 1	68
2. Lampiran 2	72
3. Lampiran 3	77
4. Lampiran 4	82
5. Lampiran 5	87
6. Lampiran 6	92
7. Lampiran 7	93
8. Lampiran 8	94

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Republik Indonesia menganut asas desentralisasi, asas dekonsentrasi, dan tugas pembantuan dalam menyelenggarakan pemerintahan dengan memberi kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk melaksanakan otonomi daerah (UU No. 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah, 1999: 60-64). Hal ini dijelaskan dalam pasal 18 UUD 1945, sehingga pasal 18 UUD 1945 menjadi landasan yang kuat bagi Tap XV/MPR/1998 tentang penyelenggaraan otonomi daerah, pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-Undang Otonomi daerah pada tanggal 1 Januari 2001, yaitu dengan di berlakukannya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah, Pasal 1h. Otonomi diselenggarakan dalam rangka memperbaiki keadaan, baik di dalam maupun di luar negeri guna menghadapi persaingan global, yaitu dengan memberi kewenangan kepada masing-masing daerah untuk melaksanakan pemerintahannya sendiri. Maka pemerintah daerah memiliki kewenangan dan tanggung jawab terhadap pemerintah pusat dalam mengelola sumber daya alam yang dimilikinya sesuai dengan prosedur. Pemerintah daerah juga dituntut untuk bisa lebih mengoptimalkan sumber daya yang ada dengan pengelolaan secara profesional agar tercapai tujuan yang efektif dan efisien.

Menurut UU No. 25 Tahun 1999, dalam penyelenggaraan Otonomi daerah diperlukan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah (1999: 120-123). Sumber pembiayaan pelaksanaan desentralisasi terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, dana perimbangan, pinjaman daerah dan penerimaan lain-lain yang sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber keuangan daerah yang berasal dari dalam daerah itu sendiri yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan, dan penerimaan lain-lain yang sah.

Pendapatan Asli Daerah juga bersumber dari berbagai macam kontribusi di dalam daerah tersebut. Salah satunya adalah kontribusi yang berasal dari Pemerintah Kabupaten/Daerah Tingkat II. Pemerintahan Daerah Tingkat II memiliki bermacam-macam kontribusi dengan keunggulan yang berbeda-beda sehingga dapat mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerahnya.

Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) akan menjadi fasilitator bagi para pelaku ekonomi seperti masyarakat, perusahaan, dan lembaga keuangan dalam menentukan kebijakan dan membuat peraturan-peraturan bagi kepentingan daerah. Dengan demikian, Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dituntut untuk siap menghadapi otonomi daerah tersebut. Pemerintah Daerah akan lebih leluasa dalam mengelola pajak daerah dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) setelah otonomi daerah diberlakukan. Hal ini dapat dilakukan dengan persyaratan usaha dan strategi tertentu, mengingat kondisi

BUMD sekarang masih memprihatinkan (Bisnis Indonesia, 22 Desember 1999).

Pinjaman daerah pun belum bisa diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan daerah langsung, karena pelaksanaan pinjaman daerah dilakukan melalui pemerintah pusat sebagai janji pemerintahan dalam *Letter of Intent* (LOI) keempat yang ditandatangani di Jakarta, 13 Desember 2001 yang lalu (Kompas, 15 Desember 2001, hal 13).

Untuk itu penulis akan mengkaji lebih jauh dan menganalisis seberapa besar kontribusi sumber daya daerah tersebut, yang berasal dari pajak daerah dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah penulis sajikan, penulis mengambil beberapa rumusan masalah, diantaranya.

1. Berapa besar kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD di Kabupaten Boyolali periode 2001-2005?
2. Berapa besar kontribusi Laba BUMD terhadap PAD di kabupaten Boyolali periode 2001-2005?
3. Bagaimana tingkat pertumbuhan kontribusi pajak daerah dan laba BUMD periode 2001-2005?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan analisis data yang ada, penulis akan mengetahui beberapa kesimpulan.

1. Besarnya kontribusi pajak daerah terhadap PAD di Kabupaten Boyolali periode 2001-2005.
2. Besarnya kontribusi laba BUMD terhadap PAD di Kabupaten Boyolali periode 2001-2005.
3. Tingkat pertumbuhan kontribusi sektor pajak daerah dan laba BUMD periode 2001-2005.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini sebagai wacana dan masukan untuk bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan, untuk dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah khususnya dari sektor Pajak Daerah dan laba BUMD.

2. Bagi Universitas Sanata Dharma

Hasil Penelitian ini sebagai referensi dan bahan bacaan di perpustakaan, guna mendukung penelitian selanjutnya atau skripsi selanjutnya yang menyangkut Pajak daerah dan laba BUMD.

3. Bagi Penulis

Sebagai salah satu prasyarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi, dan meningkatkan pengetahuan di bidang Akuntansi Sektor Publik, khususnya mengenai Pajak Daerah, Laba BUMD dan Pendapatan Daerah.

E. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan karya tulis ini sistematika penulisannya terdiri dari:

1. BAB I: Pendahuluan

Bagian ini mengemukakan latar belakang topik yang akan penulis sajikan, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan sistematika penulisan.

2. BAB II: Landasan Teori

Bagian ini menguraikan teori-teori serta pengertian-pengertian pajak daerah dan laba BUMD sebagai dasar penelitian yang dilakukan penulis sesuai dengan judul.

3. BAB III: Metode Penelitian

Bagian ini menjelaskan jenis penelitian, waktu dan tempat di lakukannya penelitian, serta teknik pengumpulan dan analisis data dalam melakukan penelitian.

4. BAB IV: Gambaran Umum Pemerintah Kabupaten Boyolali

Bagian ini memberikan gambaran umum Kabupaten Boyolali berupa angka, meliputi keadaan geografis, pemerintahan, penduduk, pertanian, keuangan, dan sektor-sektor yang mendukung pariwisata.

5. BAB V: Analisis Data dan Pembahasan

Bagian ini membahas perhitungan kontribusi dengan rumus yang telah di sajikan, menghitung realisasi pendapatan pajak daerah, laba BUMD, serta total Pendapatan Asli Daerah dan

menyajikannya dalam grafik. Selain itu, bagian ini membahas pertumbuhan tingkat kontribusinya.

6. BAB VI: Penutup

Bab ini mengemukakan kesimpulan dari hasil analisis yang telah dilakukan. Serta memberikan saran kepada Pemda Boyolali sebagai pertimbangan dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan pajak daerah dan laba BUMD guna menunjang Pendapatan Asli Daerah.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pajak

1. Pengertian Pajak

Pajak adalah Iuran rakyat kepada kas Negara dengan tidak mendapat kontraprestasi secara langsung sesuai dengan Undang-Undang dapat dipaksakan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.

2. Fungsi Pajak

Fungsi pajak digunakan untuk pengeluaran umum Negara, dibedakan menjadi:

- a. Fungsi Pendanaan (*budgetair*) yaitu Pajak sebagai sumber dana bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran Pemerintah. Ditunjukkan dengan masuknya Pajak ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
- b. Fungsi Mengatur (*regulair*) yaitu fungsi Pajak sebagai alat untuk mengatur/melaksanakan kebijakan dibidang sosial dan ekonomi. Contoh PPnBM, Pajak ekspor 0% dan lain-lain.

3. Teori yang mendasari pembenaran atas pemungutan Pajak yaitu:

- a. Teori Asuransi artinya pemungutan Pajak disamakan dengan pembayaran premi yang tidak mendapatkan kontraprestasi secara langsung.
- b. Teori Kepentingan artinya pembebanan Pajak kepada masyarakat

berdasarkan atas kepentingan masyarakat terhadap keamanan yang diberikan oleh Negara atas harta kekayaannya.

- c. Teori Gaya Pikul artinya masyarakat akan membayar Pajak berdasarkan pada pemanfaatan jasa-jasa yang diberikan oleh Negara kepada masyarakat.
 - d. Teori Bakti artinya pembayaran Pajak sebagai suatu kewajiban untuk menunjukkan bakti masyarakat kepada Negara, dasar hukumnya terletak pada hubungan masyarakat dengan Negara.
 - e. Teori Asas Daya Beli artinya pembayaran Pajak tergantung pada daya beli masyarakat, sehingga pemungutan Pajak menitik beratkan pada fungsi Pajak mengatur.
4. Sistem pemungutan Pajak
- a. *Official Assesment System* adalah sistem pemungutan Pajak yang berwenang atas penentuan besarnya Pajak yang dipungut dari wajib Pajak adalah pemerintah, sehingga yang menghitung dan menagih besarnya Pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak adalah Pemerintah.
 - b. *Semi Self Assesment System* adalah Suatu sistem pemungutan Pajak yang memberi wewenang pada fiskus dan Wajib Pajak untuk menentukan besarnya Pajak seseorang yang terutang.
 - c. *Self Assesment System* adalah sistem pemungutan Pajak yang memberikan wewenang penuh kepada Wajib Pajak untuk menghitung, melaporkan ke kantor pelayanan pajak dan menyetorkan pajaknya

sendiri ke kas Negara.

- d. *Withholding system* adalah sistem pemungutan Pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong dan memungut besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

B. Sumber-sumber Pendanaan Pelaksanaan Pemerintah Daerah

Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Pendanaan penyelenggaraan pemerintahan agar terlaksana secara efisien dan efektif, serta untuk mencegah tumpang tindih ataupun tidak tersedianya pendanaan pada suatu bidang pemerintahan, maka diatur pendanaan penyelenggaraan pemerintahan. Penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibiayai dari APBD, sedangkan penyelenggaraan kewenangan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab pemerintah dibiayai oleh APBN, baik kewenangan pusat yang di konsentrasikan kepada gubernur atau ditugaskan kepada Pemerintah Daerah dan/atau sebutan lainnya dalam rangka tugas pembantuan. Sumber-sumber pendaan pelaksanaan Pemerintah Daerah terdiri dari.

1. Pendapatan Asli Daerah

Merupakan sumber utama bagi Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Pendapatan Asli Daerah meliputi: pajak daerah, retribusi daerah, hasil laba BUMD dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan Pendapatan asli lain-lain yang sah, yang

bertujuan memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi. Dana perimbangan, pinjaman daerah merupakan sumber penerimaan tambahan untuk mendukung Pendapatan Asli Daerah. Sedangkan unsur terpenting dalam Pendapatan Asli Daerah adalah pajak daerah, retribusi daerah dan laba dari perusahaan pemerintah daerah (BUMD).

Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan usaha kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pembangunan Daerah.

2. Dana Perimbangan

Dana Perimbangan merupakan dana yang bersumber dari penerimaan APBN yang di alokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana perimbangan selain dimaksudkan untuk membantu daerah dalam mendanai kewenangannya, juga bertujuan untuk mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintahan daerah. Ketiga komponen dana ini merupakan sistem transfer dana dari Pemerintah serta merupakan satu kesatuan yang utuh. Dana ini digunakan oleh pemerintah pusat untuk menyeimbangkan hubungan keuangan antara pemerintah daerah dan

pemerintah pusat.

DBH adalah dan yang bersumber dari APBN yang dibagi hasilkan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu. DAU bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antardaerah yang dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antardaerah melalui penetapan formula yang mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah. DAU suatu daerah ditentukan atas besar kecilnya celah fiskal suatu daerah yang merupakan selisih antara kebutuhan daerah dan potensi daerah. Dalam Undang-Undang ini ditegaskan kembali mengenai formula celah fiskal dan penambahan variabel DAU. Secara implisit, prinsip tersebut fungsi DAU sebagai faktor pemerataan kapasitas fiskal. DAK dimaksudkan untuk membiayai kegiatan-kegiatan khusus di daerah tertentu yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, khususnya untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar tertentu atau untuk mendorong percepatan pembangunan daerah.

3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah

Undang-Undang ini mengatur tentang hibah yang berasal dari pemerintah Negara asing, badan/lembaga asing, badan/lembaga internasional, pemerintah, badan/lembaga dalam negeri atau perseorangan, baik dalam bentuk devisa, rupiah maupun dalam bentuk barang dan atau jasa, termasuk tenaga ahli, dan pelatihan yang tidak perlu di bayar kembali.

Dalam lain-lain pendapatan selain hibah, Undang-Undang ini juga mengatur pemberian dana darurat kepada daerah karena bencana nasional dan atau peristiwa luar biasa yang tidak dapat di tanggulangi dengan dana APBD. Di samping itu, pemerintah juga dapat memberikan dana darurat kepada daerah yang mengalami krisis solvabilitas, yaitu daerah yang mengalami krisis keuangan yang berkepanjangan. Untuk menghindari menurunnya pelayanan kepada masyarakat setempat, pemerintah dapat memberikan dana darurat kepada daerah tersebut setelah di konsultasikan terlebih dahulu kepada DPR.

4. Pinjaman Daerah

Pinjaman daerah merupakan salah satu sumber pembiayaan yang bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Pembiayaan yang bersumber dari pembiayaan harus dikelola secara benar agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi keuangan daerah sendiri serta stabilitas ekonomi dan moneter secara nasional. Oleh karena itu, pinjaman daerah perlu mengikuti kriteria, persyaratan, mekanisme dan sanksi pinjaman daerah yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Dalam Undang-Undang ini juga ditegaskan bahwa daerah dilarang melakukan pinjaman langsung ke luar negeri. Pinjaman yang bersumber dari luar negeri hanya dapat dilakukan melalui pemerintah dengan mekanisme penerusan pinjaman. Pengaturan ini di maksudkan agar terdapat prinsip kehati-hatian dan kesinambungan fiskal dalam kebijakan

fiskal dan moneter oleh pemerintah. Di lain pihak, pinjaman daerah tidak hanya dibatasi untuk membiayai prasarana dan sarana yang menghasilkan penerimaan, tetapi juga dapat untuk membiayai proyek pembangunan prasarana dasar masyarakat walaupun tidak menghasilkan penerimaan. Selain itu dilakukan pembatasan pinjaman dalam rangka pengendalian defisit APBD dan batas kumulatif pinjaman pemerintah daerah.

Daerah juga dimungkinkan untuk menerbitkan Obligasi Daerah dengan persyaratan tertentu, serta mengikuti peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan memenuhi ketentuan nilai bersih maksimal Obligasi Daerah yang mendapatkan persetujuan Pemerintah. Segala bentuk akibat atau risiko yang timbul dari penerbitan Obligasi Daerah menjadi tanggung jawab daerah sepenuhnya.

C. BUMD

BUMD adalah Badan usaha yang didirikan/dibentuk oleh Pemerintah Daerah guna mengembangkan perekonomian daerah dan menambah Pendapatan Asli Daerah. Berhubung dengan itu maka Perusahaan Daerah harus didasarkan pada azas-azas ekonomi yang sehat, atau Perusahaan Daerah harus melakukan kegiatannya secara berdaya guna dan berhasil guna. Dalam hal ini perlu dicegah adanya kecenderungan kearah sistem serba Negara (*etatisme*) dan memonopoli sebagaimana telah digariskan dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara. Perusahaan milik daerah Kabupaten Boyolali meliputi PD.BPR Bank Pasar, PD. BPR BKK, Perusahaan Daerah Aneka Karya, dan

PDAM.

1. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) “Bank Pasar”

Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) “Bank Pasar” sebagai BUMD berazaskan demokrasi ekonomi dengan prinsip kehati-hatian. PD. BPR “Bank Pasar” didirikan dengan maksud dan tujuan untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah di segala bidang serta sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Hal ini diatur oleh Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2003. PD.BPR “Bank Pasar” mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut. Tugas PD. BPR “Bank Pasar” adalah mengembangkan perekonomian dan menggerakkan pembangunan daerah melalui kegiatannya sebagai Bank Perkreditan Rakyat. Adapun fungsi PD. BPR “Bank Pasar” yaitu.

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan deposito berjangka.
- b. Memberikan kredit dan melakukan pembinaan khusus pada pengusaha kecil.
- c. Melakukan kerja sama dengan lembaga perbankan dan keuangan lainnya.
- d. Menjalankan usaha perbankan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Sesuai tugas dan fungsinya, bentuk layanan PD. BPR “Bank Pasar” terhadap masyarakat Kabupaten berupa.

- a. Penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan deposito berjangka.
- b. Memberikan kredit dan melakukan pembinaan khusus pada pengusaha kecil.

Adapun penggunaan laba bersih PD. BPR “Bank Pasar” berdasarkan Peraturan Daerah, ditetapkan sebagai berikut.

- a. Bagian Laba untuk pemerintah daerah 40%
- b. Cadangan Umum 20%
- c. Cadangan Tujuan 20%
- d. Dana Kesejahteraan 10%
- e. Jasa Produksi 10%

2. Perusahaan Daerah Bank PD. BPR BKK

Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan yang di singkat PD. BPR BKK adalah Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan di Jawa tengah. Sesuai dengan peraturan pemerintah masing-masing telah memperoleh ijin usaha dari Menteri Keuangan dan Bank Indonesia sehingga dapat melaksanakan usahanya berdasarkan Peraturan Daerah. Perusahaan ini diatur oleh Peraturan Daerah Nomor 20 tahun 2002.

Kedudukan PD. BKK bertempat di Kecamatan, dengan wilayah kerjanya sewilayah Kabupaten/Kota di Kecamatan tempat kedudukan, dalam melakukan usahanya PD. BPR BKK berasaskan demokrasi ekonomi dengan prinsip kehati-hatian. Maksud dan tujuannya untuk

membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah di segala bidang serta Pendapatan Daerah. PD. BPR BKK berfungsi sebagai salah satu lembaga intermediasi di bidang keuangan dengan tugas menjalankan usaha sebagai Bank Perkreditan Rakyat, sesuai dengan ketentuan dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Tugas PD. BPR. BKK antara lain.

- a. Merupakan salah satu lembaga penggerak ekonomi kerakyatan
- b. Membantu menyediakan modal usaha bagi usaha mikro, kecil dan menengah.
- c. Memberikan pelayanan modal dengan cara mudah, murah, dan mengarah dalam mengembangkan kesempatan berusaha.
- d. Menjadi salah satu sumber Pendapatan Daerah.

Maksud dan tujuan PD. BPR. BKK dalam menyelenggarakan usaha-usaha antara lain.

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
- b. Memberikan kredit dan melakukan pembinaan terhadap nasabah.
- c. Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Deposito berjangka, Sertifikat deposito, Giro atau jenis lainnya pada bank lain.

- d. Menjalankan usaha-usaha perbankan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Modal dasar PD. BPR. BKK ditetapkan minimal sebesar Rp2.000.000.000 (dua milyar rupiah) dengan kepemilikan modal.

- a. Daerah sebesar 50%
- b. Kabupaten/kota sebesar 42,5%
- c. P.T. Bank BPD Jawa tengah sebesar 7,5%

Perubahan modal dasar dan kepemilikan modal di lakukan dengan persetujuan pemegang saham. Untuk pemenuhan modal dasar dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah propinsi Jawa tengah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan P.T. Bank BPD Jawa tengah dalam rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja.

Mengenai pembagian laba, laba bersih setelah di perhitungkan Pajak dan telah di sahkan oleh RUPS, pembagiannya di tetapkan sebagai berikut.

- a. Deviden 50%
- b. Cadangan Umum 10%
- c. Cadangan Tujuan 10%
- d. Dana Kesejahteraan 12%
- e. Jasa Produksi 12%
- f. Pembinaan Propinsi 4%
- g. Pembinaan Kabupaten/Kota 2%

3. Perusahaan Daerah Aneka Karya

Perusahaan Daerah Aneka Karya Kabupaten Boyolali di sebut PD. Aneka Karya adalah Perusahaan Daerah milik Pemerintah Kabupaten Boyolali yang seluruh modalnya merupakan kekayaan daerah yang di pisahkan. PD Aneka Karya berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten Boyolali, perusahaan ini dapat membuka cabang/unit baru di luar Ibu Kota Kabupaten Boyolali. Perusahaan ini diatur oleh Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2003.

PD. Aneka Karya bertujuan turut mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah serta sebagai salah satu sarana untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Perusahaan Daerah bergerak dalam bidang usaha.

- a. Perdagangan obat-obatan dan farmasi.
- b. Percetakan
- c. Pertokoan
- d. Perbengkelan
- e. Dan usaha-usaha lain yang di pandang perlu dalam rangka pengembangan PD. Aneka Karya.

Modal dasar PD. Aneka Karya di tetapkan sebesar Rp1.500.000.000 (satu setengah milyar), untuk memenuhi modal dasar Pemerintah Daerah menambah modal yang di setor secara bertahap yang besarnya di tetapkan dengan Keputusan Bupati yang telah di anggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai

dengan kemampuan keuangan daerah dan atau dari sumber keuangan lainnya yang sah dalam kurun waktu lima tahun sejak di tetapkan Peraturan Daerah ini. Apabila di pandang perlu Bupati dapat menambah modal dasar PD. Aneka Karya setelah di anggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pemupukan modal di dapat dari cadangan tujuan dan cadangan umum. Semua alat likuid di simpan dalam kas atau bank yang di tunjuk bupati. Pengurus PD. Aneka Karya terdiri dari direksi dan badan pengawas.

Penetapan laba bersih Perusahaan Daerah Aneka Karya setelah dikurangi pajak sebagai berikut.

- a. Bagian laba Pemerintah Daerah 45%
- b. Cadangan Tujuan 15%
- c. Cadangan Umum 15%
- d. Jasa Produksi 15%
- e. Dana Pensiun 10%

4. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)

PDAM sebagai BUMD memiliki potensi dan peluang yang cukup baik untuk berkembang sesuai dengan perkembangan pembangunan dan peningkatan kemampuan masyarakat. Hal ini diatur oleh Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2004. Usaha peningkatan kinerja PDAM dapat dilakukan dengan beberapa hal berikut ini.

- a. Mengubah sikap operasional dari birokrasi ke wirausaha.
- b. Memahamkan kepada pegawai bahwa konsumen adalah asset

- perusahaan terbesar.
- c. Menyiapkan sarana dan prasarana operasional dengan memantapkan sarana produksi air bersih sehingga layak beroperasi.
 - d. Memantapkan sistem manajemen operasi dalam hal penyiapan perangkat lunak, perangkat keras, dan peningkatan sumber daya manusia.
 - e. Membuat program jangka pendek dan jangka panjang sebagai arah operasional.
 - f. Melakukan pemetaan terhadap tantangan dan peluang yang di hadapi PDAM. Tantangan muncul karena adanya kelemahan, sedangkan peluang muncul karena adanya kekuatan.

Untuk mengurangi tingkat kehilangan air dapat di lakukan dengan meningkatkan mutu pekerjaan fisik, seperti pekerjaan pemasangan pipa distribusi sekunder/tersier serta sambungan rumah. Pekerjaan pemasangan pipa distribusi kurang mendapatkan perhatian karena berkaitan dengan paket-paket kontrak pekerjaan yang melibatkan rekanan-rekanan dari golongan ekonomi lemah. Sambungan rumah yang menggunakan bahan-bahan bermutu rendah juga sangat memungkinkan terjadinya kebocoran air. Disamping meningkatkan mutu pekerjaan fisik, tingkat kehilangan air dapat juga dikurangi dan dicegah dengan meningkatkan kualitas para karyawan yang menjadi Sumber Daya Manusia di PDAM. Seperti mengurangi terjadinya

kesalahan-kesalahan administratif lainnya.

Kenaikan tarif PDAM berkaitan dengan tingkat pemakaian, makin banyak pemakaian makin tinggi tarifnya. Bagi masyarakat dengan pendapatan rendah, pemakaian air akan dilakukan secara hemat hanya untuk kebutuhan dasarnya yang berupa minum dan memasak. Untuk kebutuhan dasar itulah, tarif air harus terjangkau oleh semua lapisan masyarakat, termasuk masyarakat bukan pelanggan PDAM yang umumnya justru membeli air lebih mahal.

Akan tetapi adilkah menganggap air PDAM mahal hanya karena tidak dapat langsung diminum, padahal dapat diperoleh langsung. Menganggap air PDAM tidak layak minum pun sebenarnya kurang tepat. Air hasil produksi PDAM apabila diperoleh langsung ditempat dimana air tersebut diproduksi pada instalasi pengolahan atau mata air dimana air yang akan didistribusikan telah terlebih dahulu diberi disinfektan juga layak minum.

Penilaian kinerja PDAM mempertimbangkan komponen biaya operasional yang sangat tergantung dengan kondisi ekonomi, misalnya biaya bahan bakar untuk mesin-mesin PDAM, oleh karena itu apabila biaya bahan bakar naik, maka biaya operasional menjadi semakin mahal. Sedangkan untuk mengubah tarif harga jual air ke pelanggan sangat tidak mudah, artinya harus melalui beberapa proses sementara biaya operasional sudah naik terlebih dahulu. Hal inilah yang menyebabkan mengapa setoran laba PDAM kepada pemerintah turun.

D. Istilah dalam Pemerintah Daerah yang sesuai dengan UU No.5 tahun 1974 yang diberi penegasan adalah.

1. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari presiden dan pembantu- pembantunya, yang dimaksud dengan pembantu presiden disini sebagaimana yang dimaksud dengan pasal 4 ayat (2) dan pasal 17 ayat (1).
2. Desentralisasi adalah penyerahan urusan Pemerintahan dari daerah tingkat atasnya kepada daerah urusan rumah tangganya.
3. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.
4. Tugas pembantu adalah tugas untuk turut serta dalam melaksanakan urusan Pemerintahan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah oleh Pemerintah Daerah tingkat atasnya, dengan kewajiban mempertanggung jawabkan kepada yang menugaskannya.
5. Daerah Otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu yang berhak, berwenang, dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah atau kepala wilayah atau kepala instansi vertikal tingkat atasnya kepada

pejabat-pejabatnya di daerah.

7. Wilayah Administratif adalah lingkungan kerja perangkat pemerintah yang menyelenggarakan pelaksanaan tugas pemerintahan umum di daerah.
8. Instansi Vertikal adalah perangkat dari departemen-departemen atau lembaga-lembaga pemerintah bukan departemen yang mempunyai lingkungan kerja di wilayah yang bersangkutan.
9. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang berwenang mensahkan Peraturan Daerah atau keputusan kepala daerah yaitu menteri dalam negeri bagi daerah tingkat I dan gubernur kepala daerah bagi daerah tingkat II, sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
10. Urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang meliputi bidang-bidang Ketentraman dan Ketertiban, Politik, Koordinasi, Pengawasan dan urusan Pemerintahan lainnya yang tidak termasuk dalam tugas sesuatu instansi dan tidak termasuk urusan rumah tangga daerah.
11. Polisi Pamong Praja adalah perangkat wilayah yang bertugas membantu kepala wilayah dalam menyelenggarakan Pemerintahan khususnya dalam melaksanakan wewenang, tugas dan kewajiban dibidang Pemerintahan umum.

E. Kontribusi

Kontribusi adalah iuran/sumbangan/sesuatu yang diberikan bersama-sama dengan pihak lain untuk tujuan, biaya atau kerugian tertentu atau bersama.

Tingkat kontribusi adalah proporsi jenis Pajak terhadap Total Penerimaan Pajak baik sebelum dan sesudah pemberlakuan Undang-Undang No.34 Tahun 2000.

F. Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah jenis Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah yang dalam pelaksanaannya sehari-hari dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah.

Hasil dari pemungutan Pajak Daerah dikumpulkan dan dimasukkan sebagai bagian dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sesuai dengan Undang-Undang No.34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jenis pajak yang dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah (DIPENDA) adalah.

1. Pajak Daerah yang dipungut oleh Pemerintah Propinsi terdiri dari.
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
 - d. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan
2. Pajak Daerah yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten terdiri dari.
 - a. Pajak Hotel dan Restoran
 - b. Pajak Hiburan
 - c. Pajak Reklame
 - d. Pajak Penerangan Jalan

e. Pajak Pengambilan bahan galian golongan C

f. Pajak Parkir

Pemerintah Daerah selain memungut Pajak juga melakukan pemungutan dengan nama Retribusi yaitu pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan yang terdiri dari tiga Jenis Retribusi.

1. Retribusi Jasa Umum
2. Retribusi Jasa Usaha
3. Retribusi Perizinan Tertentu

Menurut Undang-Undang No.34 Tahun 2000 jenis Pajak Daerah, di Pemerintah Kabupaten adalah.

a. Pajak Hotel

Merupakan Pajak atas Jasa Hotel dan pelayanannya. Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap, istirahat, memperoleh pelayanan, dan/atau fasilitas lain dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lain yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali pertokoan.

b. Pajak Restoran

Merupakan Pajak atas Pelayanan Restoran. Restoran adalah tempat menyantap makanan dan/atau minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk jasa boga.

c. Pajak Hiburan

Merupakan Pajak atas Penyelenggaraan Hiburan. Hiburan adalah semua jenis pertunjukan, permainan, ketangkasan, dan/atau keramaian dengan nama dan bentuk apapun dimana hiburan tersebut disaksikan atau dinikmati dengan pungutan bayaran.

d. Pajak Reklame

Merupakan Pajak atas Penyelenggaraan Reklame. Reklame adalah media, alat benda dan perbuatan yang menurut bentuk dan corak ragamnya digunakan untuk tujuan komersial seperti memperkenalkan, menganjurkan, memuji suatu barang atau orang. Reklame juga bertujuan untuk menarik perhatian umum atas barang atau orang yang ditempatkan disuatu tempat atau beberapa tempat yang dapat dilihat, dibaca dan didengar (tidak termasuk yang dilakukan pemerintah).

e. Pajak Penerangan Jalan

Merupakan Pajak atas penggunaan tenaga listrik dengan ketentuan bahwa di wilayah Daerah tersebut tersedia Penerangan Jalan dimana rekeningnya dibayar oleh Pemerintah Daerah.

f. Pajak Parkir

Merupakan Pajak atas penyelenggaraan tempat Parkir diluar badan jalan oleh pribadi atau badan. Usaha Parkir dapat dikaitkan dengan usaha pokok maupun yang masih disediakan sebagai suatu usaha termasuk tempat Penitipan Kendaraan Bermotor dan Garasi Kendaraan Bermotor yang memungut biaya.

Undang-Undang No.34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi pasal 2 dan pasal 3 disebutkan bahwa jenis Pajak Daerah (Kabupaten/Kota) dan tarif maximumnya adalah Pajak Hotel dan Restoran (10%), Pajak Hiburan (35%), Pajak Reklame (25%), Pajak Penerangan Jalan (10%), Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C (20%) dan Pajak Parkir (20%).

Disamping jenis pajak tersebut daerah (Kabupaten/Kota) dapat menetapkan jenis pajak Kabupaten/Kota yang lain tetapi memenuhi kriteria sebagai berikut.

- a. Bersifat Pajak dan bukan Retribusi.
- b. Obyek Pajak terletak atau terdapat di wilayah Daerah Kabupaten/ Kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukup rendah serta hanya melayani masyarakat di wilayah daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
- c. Obyek dan Dasar Pengenaan Pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum.
- d. Obyek Pajak bukan merupakan Obyek Pajak Propinsi dan atau Obyek Pajak Pusat.
- e. Potensinya memadai.
- f. Tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif.
- g. Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat.
- h. Menjaga kelestarian lingkungan.

Disamping pajak daerah Kabupaten/Kota, Kabupaten/Kota juga menerima (*share*) bagian pajak propinsi sebesar prosentase tertentu yang terdiri dari.

- a. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air tarif maksimum 5% (*share* minimum 30%).
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air tarif maksimum 10% (*share* minimum 30%).
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor tarif maksimum 5% (*share* minimum 70%).
- d. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan tarif maksimum 20% (*share* minimum 70%).

G. Penelitian-penelitian sebelumnya yang melandasi topik

Dalam penelitian sebelumnya di Kabupaten Boyolali hanya menganalisis mengenai pertanian dan mengenai kinerja pemerintah dalam mengelola Koperasi Unit Desa (KUD). Untuk topik ini penulis akan menganalisis mengenai kontribusi Pajak Daerah yang memiliki kontribusi besar dan laba BUMD yang memiliki kontribusi terkecil sebagai sampel di Pemerintah Kabupaten Boyolali.

BAB III

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan ini adalah studi kasus pada Dinas Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Boyolali.

2. Waktu dan Tempat Penelitian

Waktu Penelitian : Penelitian akan dilaksanakan 3 bulan yaitu bulan Oktober sampai Desember tahun 2006.

Tempat Penelitian : Penelitian akan dilaksanakan di Dinas Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Boyolali.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Pengumpulan data dengan cara melakukan wawancara kepada kepala sub Dinas Pendapatan Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali.

b. Dokumentasi

Pengumpulan data dengan memfotokopi data laporan pendapatan dari sektor Pajak Daerah dan laba BUMD dari Dinas Pendapatan Daerah guna penelitian.

4. Teknik Analisis Data

a. Dalam melakukan analisis ini, penulis menggunakan teknik analisis data kuantitatif. Untuk menjawab permasalahan yang pertama, kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah dihitung dengan rumus

kontribusi (Yusup).

$$C_n = \frac{RX_n}{RY_n} \times 100\%$$

Keterangan: C_n = Kontribusi Pajak Daerah tahun n

RX_n = Realisasi Penerimaan Pajak Daerah tahun n

RY_n = Realisasi Total Pendapatan Asli Daerah tahun n

Kemudian setelah itu dari hasil perhitungan yang dilakukan dengan menggunakan rumus di atas, angka-angkanya dimasukkan dalam tabel.

Tabel III.4.a

Untuk penerimaan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Tahun anggaran	Realisasi penerimaan Pajak Daerah (Rp)	Total Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Kontribusi (%)

Untuk menjawab permasalahan yang kedua, penulis menggunakan rumus.

$$\text{Kontribusi Laba BUMD} = \frac{\text{Penerimaan Laba BUMD}}{\text{Total Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

Kemudian dari hasil perhitungan yang dilakukan dengan menggunakan rumus diatas, angka-angkanya dimasukkan dalam tabel.

Tabel III.4.b

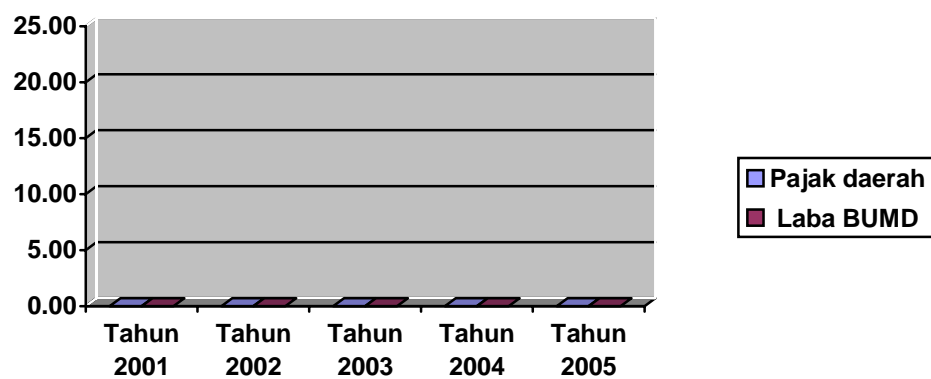
Untuk penerimaan Laba BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah

Tahun anggaran	Realisasi penerimaan Laba BUMD (Rp)	Total Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Kontribusi (%)

Dari perhitungan yang dimasukkan dalam tabel tersebut penulis akan mengetahui seberapa besar kontribusi, yang dihasilkan dari sektor Pajak Daerah dan Laba Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk setiap tahunnya.

Untuk lebih jelasnya, penulis akan memasukkan angka dari hasil perhitungan tabel III.4.a dan III.4.b diatas, ke dalam grafik.

Contoh grafik



Grafik III.4. Grafik tingkat kontribusi Pajak Daerah dan Laba BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah (%)

Dari sini dapat di ketahui bagaimana tingkat kontribusi dari Pajak Daerah dan Laba BUMD, dari tahun ke tahun selama periode tersebut, apakah terjadi kenaikan atau penurunan secara kuantitas, sehingga bisa dibuat suatu kesimpulan.

Untuk menjawab permasalahan ketiga mengenai tingkat pertumbuhan kontribusi sektor Pajak Daerah dan laba BUMD, penulis menggunakan rumus

tingkat pertumbuhan/ perkembangan (Maria).

$$Q_{o,n} = \frac{\sum Q_n}{\sum Q_o} \times 100\%$$

Keterangan:

$Q_{o,n}$ = Angka indeks kuantitas tahun n dengan tahun dasar 0

Σ = Jumlah

Q_n = Jumlah kontribusi pada tahun tertentu yang akan dihitung

Q_o = Kontribusi pada tahun dasar

Dari hasil perhitungan dengan rumus diatas, angka-angkanya dimasukkan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel III.4.c
Tingkat pertumbuhan kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah

Tahun	Kontribusi Pajak Daerah	Kontribusi Pada Tahun Dasar	Angka Indeks (%)	Pertumbuhan (%)
2001				
2002				
2003				
2004				
2005				

Dari tabel di atas akan dapat diketahui bagaimana tingkat pertumbuhan kontribusi yang dihasilkan dari sektor Pajak Daerah dimana dari hasil penghitungan dengan rumus diatas tersebut, untuk tiap tahunnya dikurangi sebesar 100% sebagai angka indeks/dasar.

Tabel III.4.d
Tingkat pertumbuhan kontribusi Laba BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah

Tahun	Kontribusi Laba BUMD	Kontribusi Pada Tahun Dasar	Angka Indeks (%)	Pertumbuhan (%)
2001				
2002				
2003				
2004				
2005				

Dari tabel diatas dapat diketahui, bagaimana tingkat pertumbuhan kontribusi yang dihasilkan dari sektor Laba BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah tersebut untuk setiap tahunnya, setelah dikurangi dengan angka indeks/patokan sebesar 100%.

Setelah itu penulis dapat mengetahui bagaimana tingkat pertumbuhan kontribusi yang di hasilkan dari kedua sektor tersebut untuk tiap tahunnya, maka penulis dapat mengambil kesimpulan dari hasil penelitian ini.

b. Menentukan kesimpulan.

Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan teknik analisis data diatas, dan dari hasil perhitungan yang dimasukkan dalam tabel, dan grafik yang sudah dibuat, penulis dapat mengetahui besarnya kontribusi, pertumbuhan kontribusi dari sektor Pajak Daerah dan laba BUMD, dan menarik kesimpulan.

BAB IV

GAMBARAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI

Dalam Bab ini akan di uraikan tentang gambaran umum Kabupaten Boyolali dalam angka dengan data terbarunya yaitu tahun 2005 sebagai berikut:

A. Letak Geografis

Kabupaten Boyolali merupakan salah satu dari 35 Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa tengah, terletak antara 110° 22'- 110° 50' Bujur timur dan 7° 36'- 7° 71' Lintang selatan, dengan ketinggian antara 75-1500 meter di atas permukaan laut. Wilayah Kabupaten Boyolali dibatasi oleh

Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Semarang, sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sragen, Kabupaten Sukoharjo. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Klaten, dan Daerah Istimewa Yogyakarta, sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Magelang dan Kabupaten Semarang. Jarak bentang dari Barat ke Timur 48 Km, Utara ke Selatan 54 Km.

Keadaan alam di Daerah Boyolali terdiri dari:

1. Jenis Tanah

Jenis tanah Asosiasi dan Grumosol terdapat di wilayah Kecamatan Kemusu, Klego, Andong, Karanggede, Wonosegoro, dan Juwangi. Tanah Litosol coklat terdapat di wilayah Kecamatan Cepogo, Ampel, dan Selo. Tanah Regosol kelabu terdapat di wilayah Kecamatan Cepogo, Ampel, Boyolali, Mojosongo, Banyudono, Teras dan Sawit. Tanah Litosol dan

Regosol kelabu terdapat di wilayah Kecamatan Cepogo, Musuk, Mojosongo, Teras, Sawit, dan Banyudono. Tanah Andosol coklat terdapat di wilayah Kecamatan Cepogo, Ampel, dan Selo. Tanah Asosiasi Grumosol kelabu tua dan Litosol terdapat di wilayah Kecamatan Cepogo, Ampel, dan Selo. Tanah Mediteran coklat tua terdapat di wilayah Kecamatan Kemusu, Klego, Andong, Karanggede, Wonosegoro, Simo, Nogosari, Ngemplak, Mojosongo, Sambu, Teras, dan Banyudono.

2. Struktur Tanah

Bagian Timur laut sekitar wilayah Kecamatan Karanggede dan Simo pada umumnya Tanah Lempung. Bagian Tenggara sekitar wilayah Kecamatan Banyudono dan Sawit pada umumnya Tanah Geluh. Bagian Barat laut sekitar wilayah Kecamatan Musuk dan Cepogo pada umumnya tanah berpasir. Bagian Utara sepanjang Grobogan pada umumnya tanah berkapur.

3. Topografi

Untuk topografinya terdiri dari 75-400 DPL meliputi wilayah Kecamatan Teras, Banyudono, Sawit, Mojosongo, Ngemplak, Simo, Nogosari, Kemusu, Karanggede, dan Boyolali. Untuk 400-700 DPL meliputi wilayah Kecamatan Boyolali, Musuk, Ampel, dan Cepogo. Untuk topografi 700-1000 DPL meliputi wilayah Kecamatan Musuk, Ampel, dan Cepogo. Topografi 1000-1300 DPL meliputi wilayah Kecamatan Cepogo, Ampel, dan Selo. Kemudian 1300-1500 DPL meliputi wilayah Kecamatan Selo.

4. Gunung

Kabupaten Boyolali terdapat dua gunung yaitu Gunung Merapi dan Gunung Merbabu. Keduanya berada di wilayah Kecamatan Selo, Cepogo, dan Ampel.

5. Perairan

Di Kabupaten Boyolali terdapat berbagai macam sumber mata air dan perairan yang terdiri dari:

- a. Sumber air dangkal/mata air, yang termasuk kategori sumber ini adalah Umbul Tlatar di wilayah Kecamatan Boyolali, Nepen terdapat di wilayah Kecamatan Teras, Umbul Pengging terdapat di wilayah Kecamatan Banyudono, dan Pantaran di wilayah Kecamatan Ampel.
- b. Waduk, di Kabupaten Boyolali terdiri dari empat waduk diantaranya Waduk Kedongombo (3536 Ha) di wilayah Kecamatan Kemusu, (48 Ha) di wilayah Kecamatan Andong. Waduk Cengklik (240 Ha) di wilayah Kecamatan Ngemplak, dan Waduk Bade (80 Ha) di wilayah Kecamatan Klego.
- c. Sungai, di Boyolali terdapat empat sungai yang terdiri dari Sungai Serang melintasi Kecamatan Kemusu dan Wonosegoro. Sungai Cemoro melintasi Kecamatan Simo dan Nogosari. Sungai Pepe melintasi Kecamatan Boyolali, Mojosongo, Teras, Banyudono, Sambu, Ngemplak. Sungai Gandul melintasi Kecamatan Selo, Cepogo, Musuk, Mojosongo, Teras dan Sawit.

6. Bahan Tambang

Di Kabupaten Boyolali terdapat berbagai macam bahan tambang, yang terdiri dari endapan Bentonit terdapat di Desa Bandung Kecamatan Wonosegoro. Endapan Fuller bart terdapat di Kecamatan Simo, Karanggede, dan Klego. Kalsit terdapat di desa Gunung sari Kecamatan Wonosegoro, phyrit dan wungkal terdapat di Kecamatan Wonosegoro dan Kemusu. Gamping terdapat di wilayah Kecamatan Juwangi. Pasir besi terdapat di wilayah kecamatan Mojosongo, Pasir dan Batu kali terdapat di sepanjang aliran sungai Gandul dan Pepe.

7. Luas Wilayah

Di wilayah Kabupaten Boyolali memiliki luas 101.510,19 Ha di bagi sebanyak 19 Kecamatan. Untuk lahan penggunaannya di bagi menjadi:
Tanah Sawah seluas 22.946,65 Ha, Tanah Kering seluas 78.563,53 Ha. Luas tanah bengkok dan kas desa menurut jenisnya di bagi menjadi sawah seluas 2.571,95 Ha dan Lahan kering seluas 1,315,82 Ha. Luas kas desa di bagi menjadi sawah seluas 964,53 Ha dan lahan kering seluas 1.105,08 Ha.

B. Pemerintahan

1. Kabupaten Boyolali di bagi menjadi 19 Kecamatan dan 890 Dusun, 1364 Rukun Warga/RW, 6.274 Rukun Tangga/RT. Jumlah Kelurahan di bagi menjadi 267 Kelurahan, 267 Kantor Desa, dan 267 Balai Desa.
2. Banyaknya produk DPRD Kabupaten Boyolali menurut jenisnya di bagi menjadi keputusan pimpinan sidang sebanyak 30, keputusan DPRD

sebanyak 17, dan PERDA sebanyak 3. Jumlah hari/kali sidang DPRD menurut jenisnya yaitu rapat komisi sebanyak 169, rapat fraksi sebanyak 14, rapat lainnya sebanyak 17.

3. Banyaknya Pegawai Negeri Sipil menurut satuan kerja, jenis kelamin dan golongan yaitu 36 satuan kerja, jumlah pegawai laki-laki sebanyak 7.203 orang dan pegawai perempuan sebanyak 4.882 orang. Menurut golongannya yaitu golongan I sebanyak 163 orang, golongan II sebanyak 1.823 orang, golongan III sebanyak 6.482 orang, dan golongan IV sebanyak 3.617 orang.

C. Penduduk

Jumlah kepadatan penduduk Kabupaten Boyolali tercatat dari 19 Kecamatan dengan luas 1.015,10 Km². Jumlah penduduk dengan jenis kelamin laki-laki sebanyak 460.072 jiwa dan perempuan sebanyak 481.075 jiwa, sehingga kepadatan penduduk sebesar 927 jiwa/ Km². Dengan banyak rumah tangga sebanyak 247.882 jiwa dengan besar 3,8 jiwa/rumah tangga, dengan sex ratio 95,63.

Mutasi penduduk menurut jenis kelamin dari 19 Kecamatan angka kelahiran dari jenis kelamin laki-laki sebanyak 4.264 jiwa dan perempuan sebanyak 4.186 jiwa. Untuk kematian dari jenis kelamin laki-laki sebanyak 2.199 jiwa dan perempuan 1.952 jiwa. Jumlah kedatangan sebanyak 2.155 jiwa dari jenis kelamin laki-laki sebanyak 1.037 jiwa dan perempuan 1.118 jiwa. Jumlah yang pergi sebanyak 4.311 jiwa dari jenis kelamin laki-laki sebanyak 2.092 jiwa dan perempuan sebanyak 2.219 jiwa, dengan

pertumbuhan penduduk sebesar 9,0 dengan tingkat kematian perseribu penduduk sebesar 4,4. Agama yang dianut penduduk Kabupaten Boyolali adalah Islam, Khatolik, Kristen, Hindu, Budha.

D. Pertanian

Luas pertanian di Kabupaten Boyolali dengan luas panen sebagai berikut:

1. Luas panen dan produksi Padi sawah di Kabupaten Boyolali sebesar 38.686 Ha dengan rata-rata produksi 55,08 Kw/ha dengan jumlah produksi sebesar 213.081 ton.
2. Luas panen dan produksi Padi ladang di Kabupaten Boyolali sebesar 3.683 Ha dengan rata-rata produksi 38,14 Kw/Ha dengan jumlah produksi sebesar 14.046 ton.
3. Luas panen dan produksi Jagung di Kabupaten Boyolali sebesar 29,234 Ha dengan rata-rata produksi 44,99 Kw/Ha dengan jumlah produksi sebesar 131.525 ton.
4. Luas panen dan produksi Ubi kayu di Kabupaten Boyolali sebesar 8.960 Ha dengan rata-rata produksi 165,20 Kw/Ha dengan jumlah produksi sebesar 148.019 ton.
5. Luas panen dan produksi Ubi jalar di Kabupaten Boyolali sebesar 68 Ha dengan rata-rata produksi 142,21 Kw/Ha dengan jumlah produksi sebesar 967 ton.
6. Luas panen dan produksi Kacang tanah di Kabupaten Boyolali sebesar 6.483 Ha dengan rata-rata produksi 15,33 Kw/Ha dengan jumlah produksi sebesar 9.939 ton.

7. Untuk jenis sayuran yang di produksi adalah Bawang merah, Bawang daun, Kentang, Wortel, Kobis, Sawi, Cabe, Tomat, Terong, Buncis, Mentimun, Labu siam, Kangkung, Bayam.
8. Untuk jenis Buah-buahan yang di produksi adalah Alpokat, Rambutan, Duku, Jeruk siam, Jeruk keprok, Jeruk besar, Nanas, Durian, Pisang, Jambu biji, Jambu air, Sawo, Pepaya, Mangga, Nangka.
9. Produksi tanaman di Kabupaten Boyolali jenisnya adalah Kelapa, Cengkih, Teh, Tembakau, Kencur, Jahe, Kopi robusta, Kopi ambika, Jambu mete, Kenanga, Kapuk randu, Khina, Sirih, Pace, Kayu manis, Asem, Kantil, Lengkuas, Temu lawak, Glagah arjuna.
10. Jenis hewan ternak yang ada macamnya adalah Sapi potong, Sapi perah, Kerbau, Domba, Kuda, Kambing, Babi, Kelinci.
11. Jenis ternak unggas macamnya adalah Ayam ras petelur, Ayam ras pedaging, Ayam buras, Itik, Burung puyuh.
12. Produksi ikan di perairan umum jenisnya adalah Udang, Tawas, Mujair, Nila, Lele, Gabus, Karper, Rucah, Betutu.
13. Produksi hasil hutan rakyat jenis komoditinya adalah Kayu sengon, Jati, Mahoni, Akasia, Mindi, Karet, Sono, Suren, Bamboo.
14. Produksi hasil hutan telawa juwangi jenis komoditinya adalah Kayu jati tebangan, Kayu rimba pertukangan, Kayu lainnya.

E. Industri

Banyaknya industri di Kabupaten Boyolali di bagi menurut jenisnya adalah

1. Industri argo yang terdiri dari Industri pengolahan daging, Industri susu,

makanan dari susu/krupuk susu, Industri pengolahan tepung, padi dan lainnya. Industri makanan lainnya, Industri minuman (temu lawak), Industri pengolahan tembakau.

2. Industri kimia dan hasil hutan terdiri dari Industri penggergajian dan Pengawetan kayu, Industri barang-barang dari Kayu dan Anyaman, Industri penerbitan, Industri barang-barang kimia lainnya, Industri pengolahan tanah liat, Industri semen, Industri furniture, Industri barang dari batu.
3. Industri logam mesin dan perekayasaan, terdiri dari Industri barang-barang logam lainnya.
4. Industri elektronika dan aneka, terdiri dari Industri pakaian jadi, Industri alas kaki, Industri pengolahan lainnya.
5. Jumlah industri di Kabupaten Boyolali sebanyak 27 Industri besar dan 91 Industri sedang.

F. Keuangan

Dari gambaran tentang keuangan di Kabupaten Boyolali akan di uraikan sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli daerah

Bagian ini akan menguraikan tentang laporan target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten Boyolali, yang hasilnya dapat di lihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel IV.1.a
Target dan realisasi pos Pajak Daerah

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2001	2.953.625.000	2.989.750.308	101,22
2002	3.679.918.000	4.334.366.800	117,78
2003	5.686.644.000	5.820.775.186	102,36
2004	6.050.735.000	7.244.100.746	119,72
2005	6.676.973.800	6.984.060.197	104,60
jumlah	25.047.895.800	27.373.053.237	

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah diolah

Tabel IV.1. b
Target dan realisasi Retribusi Daerah

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2001	12.119.620.000	12.454.462.899	102,76
2002	15.078.875.000	15.265.694.973	101,24
2003	18.217.288.050	20.189.284.372	110,82
2004	24.453.504.140	25.189.617.738	103,01
2005	36.901.388.440	34.579.914.970	93,71
jumlah	106.770.675.630	107.678.974.952	

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah diolah

Tabel IV.1. c
Target dan realisasi lab BUMD

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2001	269.596.000	269.596.000	100,00
2002	313.828.000	311.686.188	99,32
2003	100.943.799	100.943.799	100,00
2004	514.397.700	515.467.923	100,21
2005	3.106.432.199	3.426.513.217	110,30
Jumlah	4.305.197.698	4.624.207.127	

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah diolah

Tabel IV.1.d
Target dan realisasi Pendapatan lain-lain yang sah

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2001	1.579.060.000	1.961.357.380	124,21
2002	2.844.069.000	4.548.577.864	159,93
2003	5.752.962.894	6.433.955.701	111,84
2004	2.801.086.582	4.021.496.056	143,57
2005	3.694.309.967	4.826.417.699	130,64
Jumlah	16.671.488.443	21.791.804.700	

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah diolah

Tabel IV. 1. e
Target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2001	16.921.901.000	17.657.166.587	104,45
2002	21.916.690.000	24.460.325.825	111,61
2003	29.916.690.000	32.781.305.308	109,29
2004	33.819.723.422	36.970.682.463	109,32
2005	50.379.104.406	49.816.906.083	98,88
Jumlah	153.031.603.821	161.686.386.266	

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah

2. Pendapatan dari sektor Pariwisata

Kabupaten Boyolali memiliki beberapa Obyek Wisata yang potensial, diantaranya Obyek Wisata Pengging, Tlatar, Wana west telawa, Makam Yosodipuro, Waduk cengklik, Arga merapi merbabu, Gunung tugel, Makam Pantaran. Untuk lebih mengetahui jumlah pendapatan dari Obyek Wisata berdasarkan jumlah pengunjung dapat di lihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel IV.2.
Jumlah realisasi pendapatan sektor Pariwisata berdasarkan jumlah pengunjung

Tahun	2001 (Rp)	2002 (Rp)	2003 (Rp)	2004 (Rp)	2005 (Rp)
Pengging	49.307.200	71.489.600	86.493.000	63.206.000	61.374.000
Tlatar	72.766.400	134.366.400	209.077.000	144.134.000	135.287.000
Wana West Telawa	28.372.800	7.796.800	70.362.000	10.016.000	23.745.000
Makam Yosodipuro	4.264.500	5.838.500	8.330.400	9.379.200	9.258.400
Waduk Cengklik	1.943.000	2.668.000	4.262.400	2.238.400	2.205.600
Arga Merapi Merbabu	1.761.000	3.035.000	6.284.800	5.257.600	3.924.400
Gunung Tugel	1.435.000	1.652.500	2.795.200	1.660.800	2.180.800
Makam Pantaran	1.332.000	1.412.500	2.569.600	0	1.184.000
Jumlah	161.181.900	228.319.300	390.624.700	235.892.000	239.161.200

Sumber: Dinas Pariwisata diolah

BAB V

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data

Pajak Daerah yang di pungut oleh Pemerintah Kabupaten Boyolali antara lain Pajak Hotel dan Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengolahan dan Penggalian Bahan Galian Golongan C, dan Pajak Parkir. Dasar hukum yang melandasi pemungutan pajak-pajak tersebut adalah Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1998, Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1998, Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1998, Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 1998, Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1998 dan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2003.

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali adalah Perusahaan Daerah BPR Bank Pasar, Perusahaan Daerah BPR BKK, Perusahaan Daerah Aneka Karya, dan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Dasar hukum yang melandasi pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah tersebut adalah Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2003, Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2002, Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2003, dan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2004.

Berdasarkan tabel, akan diketahui bahwa jumlah realisasi penerimaan, khususnya dari Pajak Daerah dan laba Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak selalu mengalami kenaikan melainkan juga mengalami penurunan.

Realisasi penerimaan Pajak Daerah, laba BUMD, serta Pendapatan Asli

Daerah selama periode 2001-2005 dapat di lihat pada tabel-tabel berikut.

Tabel V.1.a
Realisasi pajak daerah dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2005

No	Jenis Pajak	Tahun 2001 (Rp)	Tahun 2002 (Rp)	Tahun 2003 (Rp)	Tahun 2004 (Rp)	Tahun 2005 (Rp)
1	Pajak Hotel dan Restoran	117.696.065	122.553.160	130.088.364	130.582.100	142.191.700
2	Pajak Hiburan	8.517.100	8.555.550	10.005.050	10.243.600	5.348.300
3	Pajak Reklame	12.883.759	72.000.000	72.000.000	72.200.000	123.182.900
4	Pajak Penerangan Jalan	2.668.185.420	3.942.989.772	5.564.355.016	6.959.690.096	6.570.434.557
5	Pajak Bahan Galian Gol.C	34.525.027	37.045.210	43.879.256	71.384.950	142.082.650
6	Pajak ABT/APT	147.942.937	151.033.608	0	0	0
7	Pajak Kendaraan tidak Bermotor	0	189.500	447.500	0	0
8	Pajak Parkir	0	0	0	0	820.000
	Jumlah pajak daerah	2.989.750.308	4.334.366.800	5.820.775.186	7.244.100.746	6.984.060.197

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah diolah

Tabel V.1.b
Realisasi laba BUMD dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2005

No	Jenis BUMD	Tahun 2001 (Rp)	Tahun 2002 (Rp)	Tahun 2003 (Rp)	Tahun 2004 (Rp)	Tahun 2005 (Rp)
1	PDAM	80.000.000	100.000.000	54.943.799	150.000.000	225.000.000
2	Perusahaan Daerah Aneka Karya	34.000.000	42.500.000	46.000.000	44.284.358	96.576.225
3	PD. BPR Bank Pasar	82.100.000	107.593.000	148.994.250	244.271.750	323.084.500
4	PD. BPR BKK	73.496.000	65.421.668	87.352.000	76.911.865	93.852.492
5	Laba Atas Penyertaan Modal	0	0	0	0	2.688.000.000
	Jumlah laba BUMD	269.596.000	315.514.668	337.290.049	515.467.923	3.426.513.217

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah diolah

Tabel V.1. c
Realisasi Pendapatan Asli Daerah dari tahun 2001 sampai dengan 2005

No	Jenis pendapatan	Tahun 2001 (Rp)	Tahun 2002 (Rp)	Tahun 2003 (Rp)	Tahun 2004 (Rp)	Tahun 2005 (Rp)
1	Pajak Daerah	2.989.750.308	4.334.366.800	5.820.775.186	7.244.100.746	6.984.060.197
2	Retribusi daerah	12.454.462.899	15.265.694.973	20.189.284.372	25.189.617.742	34.579.914.970
3	Bagian laba BUMD	269.596.000	311.686.188	337.290.049	515.467.923	3.426.513.217
4	Lain-lain PAD yang sah	1.961.357.380	4.548.577.864	6.433.955.701	4.021.496.056	4.826.417.699
	Jumlah PAD	17.675.166.587	24.460.325.825	32.781.305.308	36.970.682.467	49.816.906.083

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah diolah

B. Analisis Data

Dalam melakukan analisis data ini, penulis akan melakukan perhitungan kontribusi pajak daerah dan laba BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Boyolali.

1. Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli daerah (PAD)

Untuk mengetahui besar kontribusi Pajak Daerah dari tahun ke tahun, mulai tahun anggaran 2001 sampai dengan tahun 2005, penulis menggunakan rumus sebagai berikut.

$$C_n = \frac{RX_n}{RY_n} \times 100 \%$$

Keterangan: C_n = Kontribusi Pajak Daerah tahun n .

RX_n = Realisasi Penerimaan Pajak Daerah tahun n

RY_n = Realisasi Total Pendapatan Asli Daerah tahun n

a. Jumlah kontribusi Pajak Daerah tahun 2001 dihitung sebagai berikut.

$$\begin{aligned} C_n &= \frac{2.989.750.308}{17.675.166.587} \times 100 \% \\ &= 16,91 \% \end{aligned}$$

Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2001 sebesar 16,91%.

- b. Jumlah kontribusi Pajak Daerah tahun 2002 dihitung sebagai berikut.

$$\begin{aligned} C_n &= \frac{4.334.366.200}{24.460.325.825} \times 100 \% \\ &= 17,72 \% \end{aligned}$$

Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2002 mengalami kenaikan sebesar 0,81% dibanding tahun sebelumnya menjadi 17,72%.

- c. Jumlah kontribusi Pajak Daerah tahun 2003 dihitung sebagai berikut.

$$\begin{aligned} C_n &= \frac{5.820.775.186}{32.781.305.308} \times 100 \% \\ &= 17,76 \% \end{aligned}$$

Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2003 mengalami kenaikan sebesar 0,04%, menjadi 17,76%.

- d. Jumlah kontribusi Pajak Daerah tahun 2004 dihitung sebagai berikut.

$$\begin{aligned} C_n &= \frac{7.244.100.746}{36.970.682.467} \times 100 \% \\ &= 19,59 \% \end{aligned}$$

Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah tahun 2004 mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya sebesar 1,83%, menjadi 19,59%.

- e. Jumlah kontribusi Pajak Daerah tahun 2005 dihitung sebagai berikut.

$$C_n = \frac{6.984.060.197}{49.816.906.083} \times 100 \%$$

$$= 14,02 \%$$

Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2005 mengalami penurunan drastis sebesar 5,57%, sehingga menjadi 14,02% di banding tahun sebelumnya.

Dari perhitungan dengan menggunakan teknik analisis data yang telah dilakukan, hasilnya dapat dilihat pada tabel kontribusi penerimaan Pajak Daerah di bawah ini.

Tabel V.2.a
Kontribusi penerimaan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah

Tahun	Realisasi penerimaan Pajak Daerah (Rp)	Total Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Kontribusi (%)
2001	2.989.750.308	17.675.166.587	16,91
2002	4.334.366.200	24.460.325.825	17,72
2003	5.820.775.186	32.781.305.308	17,76
2004	7.244.100.746	36.970.682.467	19,59
2005	6.984.060.197	49.816.906.083	14,02

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah diolah

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa kontribusi Pajak Daerah Kabupaten Boyolali pada tahun 2001 adalah sebesar 16,91%; kontribusi tersebut naik menjadi 17,72% pada tahun 2002; 17,76% pada tahun 2003; dan 19,59% pada tahun 2004. Sementara itu pada tahun 2005 kontribusinya turun menjadi 14,02%.

2. Kontribusi Laba Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Untuk mengetahui besar kontribusi dari sektor laba Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), penulis menggunakan rumus sebagai berikut.

$$\text{Kontribusi Laba BUMD} = \frac{\text{Penerimaan Laba BUMD}}{\text{Total Pendapatan Asli Daerah}} \times 100 \%$$

a. Kontribusi laba BUMD tahun 2001 dihitung sebagai berikut.

$$\begin{aligned} \text{Kontribusi Laba BUMD} &= \frac{269.596.000}{17.675.166.587} \times 100 \% \\ &= 1,53 \% \end{aligned}$$

Kontribusi laba BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2001 sebesar 1,53%.

b. Kontribusi laba BUMD tahun 2002 dihitung sebagai berikut.

$$\begin{aligned} \text{Kontribusi Laba BUMD} &= \frac{315.514.668}{24.460.325.825} \times 100 \% \\ &= 1,29 \% \end{aligned}$$

Kontribusi laba BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah tahun 2002 mengalami penurunan 0,24% menjadi 1,29%.

c. Kontribusi laba BUMD tahun 2003 dihitung sebagai berikut.

$$\begin{aligned} \text{Kontribusi Laba BUMD} &= \frac{337.290.049}{32.781.305.308} \times 100 \% \\ &= 1,03 \% \end{aligned}$$

Kontribusi laba BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah tahun 2003 sebesar 1,03%. Kontribusi tersebut mengalami penurunan

dibanding tahun sebelumnya, yaitu sebesar 0,26%.

- d. Kontribusi laba BUMD tahun 2004 dihitung sebagai berikut.

$$\begin{aligned}\text{Kontribusi Laba BUMD} &= \frac{515.467.923}{36.970.682.467} \times 100 \% \\ &= 1,39 \%\end{aligned}$$

Kontribusi laba BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2004 sebesar 1,39%, kontribusi tersebut mengalami kenaikan di banding tahun sebelumnya, yaitu sebesar 0,36%.

- e. Kontribusi laba BUMD tahun 2005 dihitung sebagai berikut.

$$\begin{aligned}\text{Kontribusi Laba BUMD} &= \frac{3.426.513.217}{49.816.906.083} \times 100 \% \\ &= 6,88 \%\end{aligned}$$

Kontribusi laba BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2005 naik drastis sebesar 5,49%, sehingga besar kontribusi menjadi 6,88%.

Tabel berikut ini akan memperjelas perhitungan dengan rumus di atas.

Tabel V.2.b
Kontribusi laba BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah

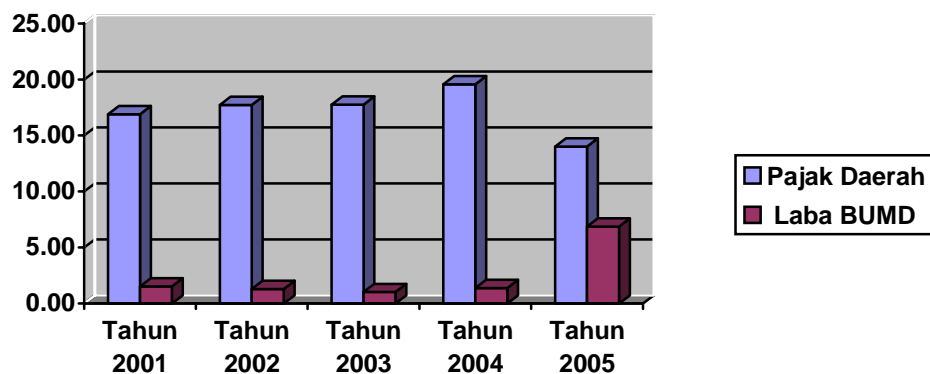
Tahun	Realisasi penerimaan laba BUMD (Rp)	Total Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Kontribusi (%)
2001	269.596.000	17.675.166.487	1,53
2002	315.514.668	24.460.325.825	1,29
2003	337.290.049	32.781.305.308	1,03
2004	515.467.923	36.970.682.467	1,39
2005	3.426.513.217	49.816.906.083	6,88

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah diolah

Dari perhitungan di atas, dapat diketahui bahwa pada tahun 2001 kontribusi laba BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten

Boyolali sebesar 1,53%. Kontribusi tersebut mengalami penurunan menjadi sebesar 1,29% pada tahun 2002 dan 1,03% pada tahun 2003, sedangkan pada tahun 2004 kontribusi tersebut mengalami kenaikan menjadi sebesar 1,39%. Demikian pula pada tahun 2004 sampai dengan 2005, kontribusi laba BUMD mengalami kenaikan yang drastis sebesar 5,49%; sehingga besarnya menjadi 6,88%. Mulai tahun 2001 sampai dengan tahun 2003 kontribusi laba BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah polanya turun, sedangkan mulai tahun 2004 sampai dengan tahun 2005 polanya naik.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik sebagai berikut.



Grafik V.1. Grafik tingkat kontribusi Pajak Daerah dan Laba BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2005 (%)

Dari grafik tersebut dapat dilihat tingkat kontribusi sektor Pajak Daerah dan laba BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah untuk tahun 2001 sampai dengan tahun 2005.

3. Tingkat Pertumbuhan Kontribusi Sektor Pajak Daerah dan Laba BUMD Selama Periode 2001 sampai dengan 2005

Untuk mengetahui tingkat pertumbuhan kontribusi sektor Pajak Daerah dan laba BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah, penulis akan melakukan penghitungan dengan menggunakan rumus sebagai berikut.

$$Q_{o,n} = \frac{\sum Q_n}{\sum Q_o} \times 100 \%$$

Keterangan:

$Q_{o,n}$ = Angka indeks kuantitas tahun n dengan tahun dasar 0

Σ = Jumlah

Q_n = Kontribusi pada tahun n

Q_o = Kontribusi pada tahun dasar

Hasil perhitungan dengan rumus di atas selanjutnya dikurangi dengan angka indeks pada tahun 2000, yaitu 100%.

a. Untuk mengetahui tingkat pertumbuhan kontribusi Pajak Daerah dihitung sebagai berikut.

Pertumbuhan kontribusi dihitung dengan menggunakan angka pembanding atau angka indeks pada tahun 2000 sebagai tahun dasar dengan besar kontribusi $15,31\% = 0,1531$.

1) Untuk tahun 2001 tingkat pertumbuhannya dihitung sebagai berikut.

$$Q_{o,n} = \frac{0,1691}{0,1531} \times 100 \%$$

$$= 110,45\%$$

Untuk tahun 2001 besar angka indeks adalah 110,45 %; sehingga pertumbuhan kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah sebesar 110,45%- 100% adalah 10,45%.

- 2) Untuk tahun 2002 tingkat pertumbuhannya dihitung sebagai berikut.

$$Qo,n = \frac{0,1772}{0,1531} \times 100 \%$$

$$= 115,74\%$$

Untuk tahun 2002 besar angka indeks adalah 115,74%; sehingga pertumbuhan kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah sebesar 115,74%- 100%= 15,74%. Angka ini naik dibanding tahun sebelumnya.

- 3) Untuk tahun 2003 tingkat pertumbuhannya dihitung sebagai berikut:

$$Qo,n = \frac{0,1776}{0,1531} \times 100 \%$$

$$= 116,00\%$$

Untuk tahun 2003 besar angka indeks adalah 116,00% sehingga tingkat pertumbuhan kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah sebesar 116,00%-100% = 16,00%. Angka ini naik lagi dibanding tahun sebelumnya.

- 4) Untuk tahun 2004 tingkat pertumbuhannya dihitung sebagai berikut.

$$Q_{o,n} = \frac{0,1959}{0,1531} \times 100 \%$$

$$= 127,96\%$$

Untuk tahun 2004 besar angka indeks adalah 127,96% sehingga tingkat pertumbuhan kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah sebesar $127,96\% - 100\% = 27,96\%$, Angka ini kembali mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya.

- 5) Untuk tahun 2005 tingkat pertumbuhannya dihitung sebagai berikut.

$$Q_{o,n} = \frac{0,1402}{0,1531} \times 100 \%$$

$$= 91,57\%$$

Untuk tahun 2005 besar angka indeks adalah 91,57% sehingga tingkat pertumbuhan kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah sebesar $91,57\% - 100\% = -8,43\%$, Angka ini mengalami penurunan dibanding tahun dasarnya.

Untuk mengetahui tingkat pertumbuhan kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel V.2.c

Tingkat pertumbuhan kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah

Tahun	Kontribusi Pajak Daerah	Kontribusi Pada Tahun Dasar	Angka Indeks(%)	Pertumbuhan (%)
2000	0,1531	0,1531	100,00	0,00
2001	0,1691	0,1531	110,45	10,45
2002	0,1772	0,1531	115,74	15,74
2003	0,1776	0,1531	116,00	16,00
2004	0,1959	0,1531	127,96	27,96
2005	0,1402	0,1531	91,57	-8,43

Sumber: Dinas Pendapatan daerah diolah

Berdasarkan hasil perhitungan dalam tabel di atas, dapat diketahui tingkat pertumbuhan kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah. Tingkat kontribusi pada tahun 2001 menunjukkan pertumbuhan positif sebesar 10,45%. Pada tahun 2002 pertumbuhan kontribusi tersebut mengalami kenaikan menjadi sebesar 15,74%; demikian pula pada tahun 2003 naik lagi menjadi sebesar 16,00%; dan menjadi 27,96% pada tahun 2004. Namun pada tahun 2005, pertumbuhan kontribusi mengalami penurunan menjadi sebesar -8,43%. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan kontribusi dari sektor Pajak Daerah pada tahun 2005 mengalami penurunan drastis.

- b. Untuk mengetahui tingkat pertumbuhan kontribusi Laba Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), penulis menggunakan rumus pertumbuhan seperti pada perhitungan Pajak Daerah yang dibahas sebelumnya, sehingga tingkat pertumbuhan kontribusi tersebut dapat dihitung sebagai berikut.

Pertumbuhan kontribusi laba BUMD terhadap Pendapatan Asli

Daerah pada tahun 2001 harus dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu tahun 2000 sebagai tahun dasar dengan angka indeks jumlah kontribusi sebesar $1,86\% = 0,0186$.

- 1) Untuk tahun 2001 pertumbuhan kontribusi laba BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah adalah sebagai berikut.

$$Q_{o,n} = \frac{0,0153}{0,0186} \times 100 \%$$

$$= 82,26\%$$

Dari hasil perhitungan tersebut diketahui pada tahun 2001 angka indeksinya sebesar 82,26% sehingga tingkat pertumbuhan kontribusi sebesar $82,26\% - 100\% = -17,74\%$

- 2) Untuk tahun 2002 pertumbuhan kontribusi laba BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah adalah sebagai berikut.

$$Q_{o,n} = \frac{0,0129}{0,0186} \times 100 \%$$

$$= 69,35\%$$

Untuk tahun 2002 angka indeksinya sebesar 69,35% sehingga tingkat kontribusi sebesar $69,35\% - 100\% = -30,65\%$, berarti terjadi penurunan dibanding tahun dasarnya.

- 3) Untuk tahun 2003 pertumbuhan kontribusi laba BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah adalah sebesar

$$Q_{o,n} = \frac{0,0103}{0,0186} \times 100 \%$$

$$= 55,38\%$$

Untuk tahun 2003 angka indeksinya sebesar 55,38% sehingga tingkat kontribusi sebesar $55,38\% - 100\% = -44,62\%$, hal ini berarti pada tahun 2003 terjadi penurunan pertumbuhan sebesar -44,62%.

- 4) Untuk tahun 2004 pertumbuhan kontribusi laba BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah adalah sebesar

$$Qo,n = \frac{0,0139}{0,0186} \times 100 \%$$

$$= 74,73\%$$

Untuk tahun 2004 angka indeksinya sebesar 74,73% sehingga tingkat kontribusinya sebesar $74,73\% - 100\% = -15,27\%$; hal ini berarti pertumbuhannya mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya.

- 5) Untuk tahun 2005 pertumbuhan kontribusi laba BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah adalah sebesar

$$Qo,n = \frac{0,0688}{0,0186} \times 100 \%$$

$$= 369,89\%$$

Untuk tahun 2005 angka indeksinya sebesar 369,89% sehingga besar pertumbuhan kontribusinya sebesar $369,89\% - 100\% = 269,89\%$. Hal ini berarti terjadi kenaikan pertumbuhan secara drastis sebesar 269,89% dibanding tahun 2000.

Untuk mengetahui tingkat pertumbuhan kontribusi yang

dihasilkan dari sektor laba BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel V.2.d

Tingkat pertumbuhan kontribusi Laba BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah

Tahun	Kontribusi laba BUMD	Kontribusi Pada Tahun Dasar	Angka Indeks(%)	Pertumbuhan (%)
2000	0,0186	0,0186	100,00	0,00
2001	0,0153	0,0186	82,26	-17,74
2002	0,0129	0,0186	69,35	-30,65
2003	0,0103	0,0186	55,38	-44,62
2004	0,0139	0,0186	74,73	-25,27
2005	0,0688	0,0186	369,89	269,89

Sumber: Dinas Pendapatan daerah diolah

Tingkat pertumbuhan kontribusi laba BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2001 sebesar -17,74%. Pada tahun 2002 pertumbuhan kontribusi tersebut sebesar -30,65% sedangkan pada tahun 2003 pertumbuhan kontribusi tersebut mengalami penurunan menjadi sebesar -44,62. Tingkat pertumbuhan kontribusi pada tahun 2004 mengalami kenaikan menjadi sebesar -25,27%. Demikian pula pada tahun 2005 dengan angka sebesar 269,89%. Hal ini menunjukkan pertumbuhan yang drastis/menanjak.

C. Pembahasan

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan selama melakukan penelitian dapat diperoleh pembahasan sebagai berikut.

1. Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah selama rentang

waktu empat tahun cenderung meningkat. Peningkatan kontribusi tersebut terjadi pada tahun 2001 sebesar 16,91%; 17,72% pada tahun 2002; 17,76% pada tahun 2003; 19,59% pada tahun 2004. Namun pada tahun 2005, terjadi penurunan drastis sebesar -5,54% sehingga besar kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah menjadi 14,02%. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, penurunan kontribusi ini disebabkan turunnya pendapatan dari beberapa jenis objek Pajak Daerah, antara lain Pajak Hiburan dan Pajak Penerangan Jalan. Penurunan juga disebabkan penghapusan Pajak ABT/APT pada tahun 2002 karena mulai tahun tersebut Pajak ABT/APT dikelola oleh Dinas Propinsi/Daerah Tingkat I. Dari hasil penelitian jenis Pajak Daerah, Pajak Penerangan Jalan memberikan kontribusi terbesar selama periode lima tahun dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2005.

2. Laba BUMD Kabupaten Boyolali memiliki kontribusi yang kecil bagi Pendapatan Asli Daerah. Berdasarkan grafik dapat diketahui kecilnya tingkat kontribusi tersebut. Hal ini disebabkan orientasi BUMD yang cenderung lebih besar kepada pelayanan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, BUMD tidak menetapkan tarif yang memberatkan masyarakat walaupun membutuhkan biaya operasional yang cukup besar. Dari beberapa jenis BUMD, PD.BPR Bank Pasar memiliki kontribusi terbesar yaitu sebesar 43,75% diluar laba atas penyertaan modal pada tahun 2005. Pada tahun 2005, kontribusi laba BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah mengalami kenaikan drastis. Hal ini disebabkan laba atas

penyertaan modal yang paling besar jumlahnya, sehingga kontribusinya menjadi 6,88% atau naik sebesar 5,49% dibanding tahun sebelumnya.

3. Tingkat pertumbuhan kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah cenderung naik dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2004 dan turun pada tahun 2005, sedangkan tingkat pertumbuhan kontribusi laba BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah cenderung turun dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2003 dan mengalami kenaikan mulai tahun 2004. Hal ini disebabkan pengelolaan Pajak Daerah dan laba BUMD yang semakin baik dan efektif. Selain itu, keadaan penduduk Kabupaten Boyolali dan potensi sumber daya alam yang ada di Kabupaten Boyolali sangat mendukung untuk berkembang.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah, teknik analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut.

1. Besar kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Boyolali cenderung naik mulai tahun 2001 sampai dengan tahun 2004. tingkat kontribusi tersebut adalah sebesar 16,91% pada tahun 2001; 17,72% pada tahun 2002; 17,76% pada tahun 2003; dan 19,59% pada tahun 2004. Sementara itu pada tahun 2005, kontribusi tersebut turun sebesar 5,54% menjadi 14,02%.
2. Besar kontribusi laba BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Boyolali cenderung turun dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2003. Besar kontribusi tersebut adalah 1,53% pada tahun 2001; 1,29% pada tahun 2002; dan 1,03% pada tahun 2003. Namun mulai tahun 2004 sampai dengan tahun 2005, kontribusi tersebut naik menjadi 1,39% pada tahun 2004; dan 6,88% pada tahun 2005.
3. Tingkat pertumbuhan kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Boyolali cenderung naik dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2004. Besar pertumbuhan tersebut adalah 10,45% pada tahun 2001; 15,74% pada tahun 2002; 16,00% pada tahun 2003 dan 27,96% pada tahun 2004 sedangkan pada tahun 2005 pertumbuhan turun -8,43%. Laba

BUMD memiliki tingkat pertumbuhan kontribusi yang menurun dari tahun 2001 sampai tahun 2003 yaitu dengan besar pertumbuhan kontribusi -17,74% pada tahun 2001 dan -30,65% pada tahun 2002. Tahun 2003 pertumbuhan kontribusi tersebut turun lagi menjadi -44,62%. Tahun 2004 sampai dengan tahun 2005 pertumbuhan kontribusi naik, dengan besar pertumbuhan dari -25,27% pada tahun 2004, sampai dengan 269,89% pada tahun 2005.

B. Keterbatasan Penelitian

Dalam melakukan penelitian, penulis memiliki beberapa keterbatasan, antara lain sebagai berikut.

1. Belum ada batasan tertentu mengenai tingkat kontribusi dan tingkat pertumbuhan. Sehingga dalam melakukan penelitian, penulis hanya mengamati terjadinya kenaikan tingkat kontribusi dan tingkat pertumbuhan dari keterangan berupa tanda positif untuk kategori baik. Apabila terjadi penurunan tingkat kontribusi dan tingkat pertumbuhan di tunjukkan dengan tanda negatif di kategorikan buruk.
2. Kurang lengkapnya data misalnya penerimaan Pajak Parkir yang di sahkan pada tahun 2003, terealisasi pada tahun 2005, dan Pajak ABT/APT yang di hapus pada tahun 2003. Hal ini disebabkan perubahan dalam Peraturan Daerah mengenai Pajak Parkir dan Pajak ABT/APT tersebut. Untuk penelitian selanjutnya data itu sudah sesuai dengan Peraturan Daerah yang baru, sehingga bisa diperoleh data yang lebih lengkap.

C. Saran

Berdasarkan hasil pengamatan, analisis data, serta kesimpulan yang telah dikemukakan, penulis dapat memberikan beberapa saran bagi Pemerintah Kabupaten Boyolali sebagai berikut.

1. Berbagai cara dapat dilakukan Pemerintah Daerah Untuk dapat meningkatkan kontribusi Pajak Daerah Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah mengoptimalkan pemungutan sehingga kebocoran dalam pemungutan bisa di kurangi. Peningkatan jumlah objek pajak dengan merangsang pihak swasta menanamkan modal di Kabupaten Boyolali, juga dapat meningkatkan pendapatan sektor Pajak Daerah sehingga diharapkan dapat meningkatkan tingkat kontribusi pajak daerah, setidaknya hampir menyamai tingkat retribusi daerah.
2. Untuk dapat meningkatkan kontribusi laba BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah, Pemerintah Daerah dapat meningkatkan laba BUMD dengan menambah usaha yang berorientasi laba, seperti perusahaan manufaktur misal perusahaan dendeng sapi dan abon sapi yang potensinya mendukung sekali di wilayah ini, atau perusahaan jasa transportasi, perusahaan dagang yang berskala besar misalnya toko *retail*, swalayan, yang sebelumnya belum ada yang di kelola oleh Pemerintah Kabupaten.
3. Untuk meningkatkan pertumbuhan kontribusi, diperlukan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang memadai. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten dapat lebih mendukung usaha-usaha swasta agar tertarik untuk berinvestasi di Kabupaten Boyolali. Mengingat potensi

sumber daya alamnya yang sangat mendukung. Jika selama ini sudah ada beberapa perusahaan yang berdiri di Kabupaten Boyolali alangkah baiknya pemerintah tetap dapat lebih meningkatkan jumlahnya, sehingga pendapatan, khususnya dari sektor pajak daerah dan laba BUMD, dapat meningkat.

Daftar Pustaka

- Agnes, Maria. 2004. Analisis Perkembangan Pendapatan Pajak Daerah
Prediksi Pendapatan Pajak Daerah Serta Potensi Pendapatan Pajak
Daerah. *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma
- Anonim. 2005. *Peraturan Daerah-Peraturan Daerah Pajak Daerah
Kabupaten Boyolali*. Boyolali: Dinas Pendapatan Daerah.
- . 2005. *Perincian Target Dan Realisasi Pendapatan Kabupaten
Boyolali*. Boyolali: Dinas Pendapatan Daerah.
- Badan Pusat Statistik. 2005. *Kabupaten Boyolali Dalam Angka*. Boyolali:
Badan Pusat Statistik
- Badrudin, Rudy. 2003. Analisis Kajian Potensi dan Pengendalian Laba
Bersih Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Sebagai Salah Satu
Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sleman, Tahun
2002. *Jurnal Akuntansi dan Manajemen*, hal 45-65. Yogyakarta:
STIE YKPN
- . 2002. Tantangan dan Peluang Pelaku Ekonomi Di Daerah
Dalam Menghadapi Otonomi Daerah. *Kajian Bisnis*, hal 121-130.
Yogyakarta: STIE WIDYA WIWAHA
- Bismoko, J & Supratiknya, A. 2004. *Pedoman Penulisan Skripsi*.
Yogyakarta : Universitas Sanata Dharma.
- Guritno, T. 1994. *Kamus Ekonomi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University
Press.
- Haning, Dedy & Wirawan, E. 2005. Analisis Potensi Pajak Daerah Di
Kota Yogyakarta. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*:
vol.1.No.1. hal 67-77. Yogyakarta: UKDW
- Ilyas, B Irawan & Richard, B. 2004. *Hukum Pajak*. Jakarta : Salemba
Empat.
- Kansil, C.S.T. 1979. *Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah*. Jakarta:
Aksara Baru.

- Kurniawan, Yusup. 2005. Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pendapatan Asli Daerah Pada Pos Pajak. *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma.
- Legowo, Herman. 2004. Manajemen Keuangan Daerah dan Pemberdayaan Akuntansi Sektor Publik. *Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan*, Hal: 61-67. Yogyakarta: STIENUS
- Mahsun, Mohamad, Firma, S & Heribertus A.P. 2006. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: BPF
- Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2003. *Tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Boyolali*.
- Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2003. *Tentang Perusahaan Daerah Aneka Karya Kabupaten Boyolali*
- Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2003. *Tentang Pajak Parkir Kabupaten Boyolali*.
- Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2004. *Tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Boyolali*.
- Peraturan Daerah No. 20 Tahun 2002. *Tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan di Propinsi Jawa Tengah*.
- Soeratno & Suparmono. 2002. Urgensi Pajak Daerah dan Penghasilan Daerah Dalam Struktur Pendapatan Asli Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Akuntansi dan Manajemen*, hal 13-21. Yogyakarta: STIE YKPN
- Soetrisno, 1982. *Dasar-dasar Keuangan Negara*. Yogyakarta: BPF
- Sri, Valentina & Aji, S. 2003. *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Undang-Undang No. 34 Tahun 2000. *Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1

TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN
KABUPATEN BOYOLALI
TAHUN 2001

\$\$
\$\$
\$\$
\$\$
\$\$
\$\$
\$\$
\$\$
\$\$
\$\$
\$\$
\$\$
\$\$

DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI

~ sub.bag. Pelaporan ~

**TARGET DAN REALISASI PENERIMAAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BOYOLALI
TAHUN 2001**

Kode Rekr	Jenis Pendapatan	Target Stl Perubahan	Realisasi	%
1	2	3	4	5
1.1.	BAGIAN SISA LEBIH PERHITUNGAN			
	ANGGARAN TAHUN YANG LALU			
1.1.1.	Pos sisa lebih perhit angg tahun lalu	4,875,502.000.00	4,889,123,172.00	100.28%
	JML BAG SISA LEBIH PERHIT ANG TH. LALU	4,875,502.000.00	4,889,123,172.00	100.28%
1.2.	PENDAPATAN ASLI DAERAH			
1.2.1	Pos Pajak Daerah			
004	Pajak Hotel dan Restoran	101,500.000.00	117,696,065.00	115.96%
005	Pajak Hiburan	8,500.000.00	8,517,100.00	100.20%
006	Pajak Reklame	70.000.000.00	12,883,759.00	18.41%
007	Pajak Penerangan Jalan	2,600,000,000.00	2,668,185,420.00	102.62%
008	Pajak Pengel & Penggl Bhn Galian Gol C	33,919,000.00	34,525,027.00	101.79%
009	Pajak ABTA/APT	139,706,000.00	147,942,937.00	0.00%
	Jumlah Pos Pajak Daerah	2,953,625,000.00	2,989,750,308.00	101.22%
1.2.2.	Pos Retribusi Daerah			
001	Retribusi Pelayanan Kesehatan	8,957,215.000.00	8,963,138,602.00	100.07%
002	Ret. Pelayanan Persampahan dan Kebersihan	179,410,000.00	199,320,525.00	111.10%
003	Ret. Penggantian Biaya Cetak KTP/KK & Akte Capil	473,889,000.00	537,628,500.00	113.45%
004	Retribusi Palayanan Pemakaman	2,000,000.00	1,950,000.00	97.50%
005	Ret. Parkir di tepi jalan Umum	32,285,000.00	33,674,400.00	104.30%
006	Ret. Pelayanan Pasar	505,955,000.00	553,452,850.00	109.39%
008	Ret. Pengujian Kendaraan Bermotor	500,000.00	505,000.00	101.00%
009	Ret. Pemeriksaan alat Pemadam Kebakaran	371,814,000.00	453,772,134.00	122.04%
010	Ret. Jasa Usaha Pemakaian Kekayaan Daerah	447,145,000.00	482,654,000.00	107.94%
014	Ret. Jasa Usaha Terminal	214,000,000.00	215,376,100.00	100.64%
015	Ret. Jasa Usaha Tempat Khusus Parkir	24,780,000.00	24,998,250.00	100.88%
019	Ret. Jasa Usaha Rumah Potong Hewan	465,000,000.00	477,632,900.00	102.72%
021	Ret. Jasa Usaha Tempat Rekreasi dan Olah Raga	107,600,000.00	149,793,725.00	139.21%
024	Ret. Jasa Usaha Produksi Daerah	17,000,000.00	17,004,500.00	100.03%
026	Ret. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	236,027,000.00	236,652,363.00	100.26%
028	Ret. Izin Gangguan	65,000,000.00	86,361,150.00	132.86%
031	Ret. Ijin Usaha Penggilingan Padi/Huller	20,000,000.00	20,545,000.00	102.73%
	Jumlah Pos Retribusi Daerah	12,119,620,000.00	12,454,462,899.00	102.76%
1.2.3.	Bagian Laba B U M D			
002	Persh Daerah Air Minum (PDAM)	80,000,000.00	80,000,000.00	100.00%
003	Perusahaan Daerah Aneka Karya	34,000,000.00	34,000,000.00	100.00%
004	Persahaan Daerah BPR Bank Pasar	82,100,000.00	82,100,000.00	100.00%
005	Perusahaan Daerah BPR BKK	73,496,000.00	73,496,000.00	100.00%
	JML. BAGIAN LABA B U M D	269,596,000.00	269,596,000.00	100.00%
1.2.4	Lain-Lain Pendapatan Asli daerah Yang Sah			
001	Hasil Penjualan Barang Milik Daerah	1,000,000.00	1,740,000.00	174.00%
002	Penerimaan Jasa Giro	710,775,000.00	617,002,031.00	86.81%
003	Sumbangan Pihak ke III	Up	0.00	
004	Pen Ganti Rugi Atas Kekada (TPT/GR)	4,329,000.00	6,139,500.00	141.82%
005	Kelebihan Pembayaran Kepada Pihak III	15,388,000.00	16,442,504.00	106.85%
006	Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	Up	0.00	#VALUE!
009	Penerimaan Lain-lain	847,568,000.00	1,320,033,345.00	155.74%
	Jumlah Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	1,579,060,000.00	1,961,357,380.00	124.21%
	JML. PENDAPATAN ASLI DAERAH SENDIRI	16,921,901,000.00	17,675,166,587.00	104.45%

[sub. bag. pelaporan - dipenda]

Kode Rek.	Jenis Pendapatan	Angg. Stl Perubahan	Realisasi	%
1	2	3	4	5
1.3	DANA PERIMBANGAN			
1.3.1	Pos Bagi Hasil Pajak			
001	Pajak Bumi dan Bangunan	4,028,621,000.00	6,852,440,282.00	170.09%
002	Bca Perolchan Ilak Atas Tanah dan Bangunan	717,081,000.00	933,235,799.00	130.14%
003	Pajak Bahn Bakar Kendaraan Bermotor	710,234,000.00	2,008,773,714.00	282.83%
004	Pen. Bagi Hasil PKB/BBNKB	1,469,177,000.00	4,173,637,000.00	284.08%
005	Pajak Penghs Orang Pribadi (Termasuk Pph 21)	1,548,274,000.00	2,075,163,400.00	134.03%
	Jumlah Pos Bagi Hasil Pajak	8,473,387,000.00	16,043,250,195.00	189.34%
1.3.2	Pos Bagi Hasil Bukan pajak			
001	Iuran Hasil Hutan (IHH)	11,700,000.00	1,422,179.00	0.00%
002	Iuran Hak Penghasilan Atas Tanah Negara	Up	0.00	0.00%
003	Iuran Hak Penghasilan Hutan	3,408,000.00	4,388,000.00	128.76%
004	Landrent	Up	0.00	0.00%
005	Pen. Iuran Explorasi/Royalti	Up	6,554,706.00	#VALUE!
006	Penerimaan Ulang Tera	1,580,000.00	0.00	0.00%
007	Pen. Bagi Hasil Sumber Daya Alam Migas	22,000,000.00	19,573,060.00	88.97%
008	Penerimaan Bagi Hasil SDA Sektor Kehutanan	293,787,000.00	0.00	0.00%
	Jml. Bagi Hasil Bukan Pajak	332,475,000.00	31,937,945.00	9.61%
1.3.3.	Pos Dana Alokasi Umum (DAU)			
001.	Dana Alokasi Umum	209,180,307,000.00	212,748,561,833.00	101.71%
	Jumlah Dana Alokasi Umum	209,180,307,000.00	212,748,561,833.00	101.71%
1.3.4	Pos Dana Alokasi Khusus (DAK).			
001	Dana Alokasi Khusus Non Reboisasi	Up	Up	
	Jumlah Pos Dana Alokasi Khusus	0.00	0.00	
1.3.5	Pos Dana Darurat			
001	Bencana alam	Up	Up	
	Jumlah Pos Dana Darurat			
	JUMLAH DANA PERIMBANGAN	217,986,169,000.00	228,823,749,973.00	
1.4	Pos Penerimaan lain yang Sah			
1.4.	Bagian Pinjaman Daerah			
1.4.1	Pinjaman Daerah	Up	Up	
	Jumlah Bagian Pinjaman Daerah	0.00	0.00	#DIV/0!
1.5	Bagian Pinjaman Pusat			
01	Pinjaman dari Pusat	6,456,875,000.00	6,046,356,166.00	93.64%
	Jumlah Penerimaan dari Pusat	6,456,875,000.00	6,046,356,166.00	93.64%
1.3.5	Pos Penerimaan Propinsi			
001	Bantuan Pembangunan dari Tk.1 (Bant 2 P0A)	198,578,000.00	198,577,600.00	100.00%
002	Penerimaan Penyisihan PBB dari Tk I Kpd Desa	0.00	0.00	#DIV/0!
003	Pen. Penyisihan Pajak dari Ret dr. Tk.I Kpd Desa/kel	101,390,000.00	0.00	0.00%
005	Pen.Sewa Tanah dan Bangunan dari Tk.1	940,000.00	1,514,000.00	161.06%
	Jumlah Pos Penerimaan dari Propinsi	300,908,000.00	200,091,600.00	66.50%
	TOTAL PENDAPATAN (1.1 S/D 1.4)	264,541,295,000.00	257,634,487,598.00	97.39%

Sumber :

[sub.bag. pelaporan - dipenda]

Perhitungan Anggaran pendapatan Daerah Kabupaten Boyolali
Tahun Tahun Anggaran 2001

**REKAPITULASI TARGET DAN REALISASI PENERIMAAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BOYOLALI
TAHUN 2001**

Kode Rek.	Jenis Pendapatan	Target Stl Perubahan	Realisasi	%
1	2	3	4	5
1.1	Bag. Sisa Lebih Perhitungan Angg. Thn Lalu			
1.1.1	Pos Sisa Lebih Perhit. Angg. Thn lalu	4,875,502,000.00	4,889,123,172.00	100.28%
1.2.	PENDAPATAN ASLI DAERAH			
1.2.1	Pos Pajak Daerah	2,953,625,000.00	2,989,750,308.00	101.22%
1.2.2.	Pos Retribusi Daerah	12,119,620,000.00	12,454,462,899.00	102.76%
1.2.3.	Pos Bagial Laba Usaha Daerah	269,596,000.00	269,596,000.00	100.00%
1.2.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	1,579,060,000.00	1,961,357,380.00	124.02%
JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PADS)		16,921,901,000.00	17,675,166,587.00	104.45%
1.3	BAG. DANA PERIMBANGAN			
1.3.1	Pos Bagi Hasil Pajak	8,473,387,000.00	16,043,250,195.00	189.34%
1.3.2	Pos Bagi Hasil Bukan pajak	332,475,000.00	31,937,945.00	9.61%
1.3.3.	Pos Dana Alokasi Umum (DAU)	209,180,307,000.00	212,748,561,833.00	101.71%
1.3.4	Pos Dana Alokasi Khusus (DAK).	Up	UP	
1.3.5	Pos Dana Darurat	Up	UP	
JUMLAH DANA PERIMBANGAN		217,986,169,000.00	228,823,749,973.00	104.97%
1.4.	BAG. PINJAMAN DAERAH			
1.4.1	Pos Pinjaman dari Pusat	6,456,875,000.00	6,046,356,166.00	93.64%
1.4.2	Pos Penerimaan Propinsi	300,908,000.00	200,091,600.00	66.50%
JUMLAH BAGIAN PINJAMAN DAERAH		6,757,783,000.00	6,246,447,766.00	92.43%
TOTAL PENDAPATAN (1.1 S/D 1.4)		246,541,295,000.00	257,634,487,598.00	104.50%

[sub. bag pelaporan - dipenda]

Sumber :
Perhitungan Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Boyolali
Tahun Anggaran 2001 (Data diolah).

LAMPIRAN 2

TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN
KABUPATEN BOYOLALI
TAHUN 2002

\$\$
\$\$
\$\$
\$\$
\$\$
\$\$
\$\$
\$\$
\$\$
\$\$
\$\$
\$\$

DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI

~ sub.bag. Pelaporan ~

**TARGET DAN REALISASI PENERIMAAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BOYOLALI
TAHUN 2002**

Kode Rek.	Jenis Pendapatan	Target Stl Perubahan	Realisasi	%
1	2	3	4	5
I.1.	BAGIAN SISA LEBIH PERHITUNGAN			
	ANGGARAN TAHUN YANG LALU			
1.1.1.	Pos sisa lebih perhit angg tahun lalu	14,747,069,000.00	14,747,069,678.00	100.00%
	JML BAG SISA LEBIH PERHIT ANG TH. LALU	14,747,069,000.00	14,747,069,678.00	100.00%
I.2.	PENDAPATAN ASLI DAERAH			
I.2.1	Pos Pajak Daerah			
004	Pajak Hotel dan Restoran	121,450,000.00	122,553,160.00	100.91%
005	Pajak Hiburan	8,550,000.00	8,555,550.00	100.06%
006	Pajak Reklamasi	70,000,000.00	72,000,000.00	102.86%
007	Pajak Penerangan Jalan	3,293,600,000.00	3,942,989,772.00	119.72%
008	Pajak Pengel & Penggl Bhn Galian Gol C	35,435,000.00	37,045,210.00	104.54%
009	Pajak Air/T/APT	150,708,000.00	151,033,608.00	0.00%
010	Pajak Kendaraan Tdk Bermotor	175,000.00	189,500.00	0.00%
	Jumlah Pos Pajak Daerah	3,679,918,000.00	4,334,366,800.00	117.78%
I.2.2.	Pos Retribusi Daerah			
001	Retribusi Pelayanan Kesehatan	11,005,680,000.00	10,822,289,323.00	98.33%
002	Ret. Pelayanan Persampahan dan Kebersihan	214,091,000.00	211,391,150.00	98.74%
003	Ret. Penggantian Biaya Cetak KTP/KK & Akte Capil	601,250,000.00	600,625,000.00	99.90%
004	Retribusi Pelayanan Pemakaman	2,000,000.00	2,110,000.00	105.50%
005	Ret. Parkir di tepi jalan Umum	35,422,000.00	36,001,000.00	101.63%
006	Ret. Pelayanan Pasar	1,129,319,000.00	1,139,528,850.00	100.90%
008	Ret. Pengujian Kendaraan Bermotor	284,292,000.00	311,092,500.00	109.43%
009	Ret. Pemeriksaan alat Pemadam Kebakaran	500,000.00	500,000.00	100.00%
010	Ret. Jasa Usaha Pemakaian Kekayaan Daerah	347,596,000.00	466,336,680.00	134.16%
014	Ret. Jasa Usaha Terminal	222,304,000.00	213,397,450.00	95.99%
015	Ret. Jasa Usaha Tempat Khusus Parkir	22,440,000.00	21,304,500.00	94.94%
019	Ret. Jasa Usaha Rumah Potong Hewan	481,750,000.00	502,979,500.00	104.41%
021	Ret. Jasa Usaha Tempat Rekreasi dan Olah Raga	185,468,000.00	199,686,015.00	107.67%
023	Ret. Jasa Usaha Pengolahan Limbah Cair	5,050,000.00	6,877,015.00	136.18%
024	Ret. Jasa Usaha Produksi Daerah	39,768,000.00	42,077,200.00	105.81%
026	Ret. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	152,560,000.00	153,293,630.00	100.48%
028	Ret. Izin Gangguan	110,000,000.00	136,761,645.00	124.33%
029	Ret. Ijin Trayek	12,189,000.00	20,535,000.00	168.47%
031	Ret. Rice Mill	21,000,000.00	26,416,250.00	125.79%
032	Ret. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	23,000,000.00	28,965,000.00	125.93%
033	Ret. Surat Ijin Perdagangan	34,000,000.00	40,745,000.00	119.84%
034	Ret. Tanda Daftar Gudang (TDG)	1,000,000.00	1,050,000.00	105.00%
035	Ret. Dol Lelang, Jemb Darurat, Andang Steger	45,500,000.00	119,583,908.00	262.82%
	Werk, Perancah Bagesting dan direksi Keet			
036	Ret. Pely Adm Unt Mend dan Legalisasi Nsk Dinas	41,696,000.00	92,797,127.00	222.56%
037	Ret. Ijin Pen Kayu di luar Kawasan Hutan	11,000,000.00	20,795,200.00	189.05%
038	Ret. Keur Mempelai	50,000,000.00	48,556,000.00	97.11%
	Jumlah Pos Retribusi Daerah	15,078,875,000.00	15,265,694,973.00	101.24%

[sub.bag. pelaporan - dipenda]

Kode Rek.	Jenis Pendapatan	Target Std Perubahan	Realisasi	%
1	2	3	4	5
1.2.3.	Pos Bagian Laba Perusahaan Milik Daerah			
002	Persh Daerah Air Minum (PDAM)	100.000.000.00	100.000.000.00	100.00%
003	Perusahaan Daerah Aneka Karya	42.500.000.00	42.500.000.00	100.00%
004	Persahaan Daerah BPR Bank Pasar	107.593.000.00	107.593.000.00	100.00%
005	Perusahaan Daerah BPR BKK	63.735.000.00	61.593.188.00	96.64%
	Jumlah Pos Bag. Laba Perusahaan Milik Daerah	313.828.000.00	311.686.188.00	99.32%
1.2.4	Pos Lain-lain pendapatan Asli Daerah Yang Sah			
001	Hasil Perjualan Barang Milik Daerah	1.650.000.00	3.040.000.00	184.24%
002	Penerimaan Jasa Giro	652.408.000.00	959.012.297.00	147.00%
003	Sumbangan Pihak ke III	0.00	2.965.000.00	
004	Pen Ganti Rugi Atas Kekada (TPT/GR)	5.157.000.00	5.157.850.00	100.02%
005	Kelebihan Pembayaran Kepada Pihak III	2.141.000.00	3.081.875.00	143.95%
006	Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	2.584.000.00	2.584.842.00	100.03%
009	Penerimaan Lain-lain	2.180.129.000.00	3.572.736.000.00	163.88%
	Jumlah Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	2.844.069.000.00	4.548.577.864.00	159.93%
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH SENDIRI	21.916.690.000.00	24.460.325.825.00	111.61%
1.3	BAGIAN DANA PERIMBANGAN			
1.3.1	Pos Bagi Hasil Pajak			
001	Pajak Bumi dan Bangunan	4.028.621.000.00	8.062.322.285.00	200.13%
002	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	1.399.291.000.00	1.509.008.715.00	107.84%
003	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	1.210.234.000.00	3.371.698.640.00	278.60%
004	Pen. Bagi Hasil PKB/BBNKB	4.407.298.000.00	5.539.747.000.00	125.69%
005	Pajak Penghs Orang Pribadi (Termasuk Pph 21)	2.571.673.000.00	2.422.952.090.00	94.22%
	Jumlah Pos Bagi Hasil Pajak	13.617.117.000.00	20.905.728.730.00	153.53%
1.3.2	Pos Bagi Hasil Bukan Pajak Sumber Daya Alam (SDA)			
001	Iuran Hasil Hutan (IHII)	11.700.000.00	0.00	0.00%
002	Iuran Hak Penghasilan Atas Tanah Negara	Up	-	0.00%
003	Iuran Hak Penghasilan Hutan	2.000.000.00	15.816.000.00	790.80%
004	Landrent	Up	-	
005	Pen. Iuran Explorasi/Royalti	Up	-	
006	Penerimaan Ulang Tera	Up	-	
007	Pen. Bagi Hasil Sumber Daya Alam Migas	22.000.000.00	117.430.891.00	533.78%
008	Penerimaan Bag. Hasil SDA Sektor Kehutanan	299.020.000.00	369.962.580.00	123.73%
	Jml. Bagi Hasil Bukan Pajak SDA	334.720.000.00	503.209.471.00	150.34%
1.3.3.	Pos Dana Alokasi Umum (DAU)			
001	Dana Alokasi Umum	249.260.000.000.00	250.946.368.750.00	100.68%
	Jumlah Dana Alokasi Umum	249.260.000.000.00	250.946.368.750.00	100.68%
1.3.4	Pos Dana Alokasi Khusus (DAK)			
001	Dana Alokasi Khusus Non Reboisasi	Up	Up	
	Jumlah Pos Dana Alokasi Kusus	0.00	0.00	
1.3.5	Pos Dana Darurat			
001	Bencana alam	Up	Up	
	Jumlah Pos Dana Darurat			
	JUMLAH DANA PERIMBANGAN	263.211.837.000.00	272.355.306.951.00	

[sub.bag. pelaporan - dipenda]

Kode Rek.	Jenis Pendapatan	Angg. Sll Perubahan	Realisasi	%
1	2	3	4	5
1.5	BAGIAN LAIN PENERIMAAN YANG SAH			
1.5.1	Pos Penerimaan dari Pusat			
01	Bantuan Penerimaan dari Pusat	3,431,184,000.00	3,676,555,377.00	107.15%
02	Dana Penyeimbang dari Pemerintah Pusat	5,530,000,000.00	5,530,000,000.00	100.00%
	Jumlah Penerimaan dari Pusat	8,961,184,000.00	9,206,555,377.00	102.74%
1.5.2	Pos Penerimaan Propinsi			
001	Bantuan Pembangunan dari Tk.I (Bant 2 P0A)	4,524,662,000.00	4,487,831,000.00	99.19%
002	Penerimaan Penyisihan PBB dari Tk I Kpd Desa	Up	Up	
003	Pen. Penyisihan Pajak dari Ret dr. Tk.I Kpd Desa/kel	Up	Up	
005	Pen.Sewa Tanah dan Bangunan dari Tk.I	Up	Up	
	Jumlah Pos Penerimaan dari Propinsi	4,524,662,000.00	4,487,831,000.00	99.19%
	JUMLAH POS BAGIAN LAIN YANG SAH	13,485,846,000.00	13,694,386,377.00	101.55%
	JUMLAH PENDAPATAN (1.1 S/D 1.5)	48,888,382,000.00	51,849,098,579.00	106.06%

[sub.bag. pelaporan - dipenda]

Sumber :

Perhitungan Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Boyolali
Tahun Anggaran 2002 (Data diolah)

**REKAPITULASI TARGET DAN REALISASI PENERIMAAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BOYOLALI
TAHUN 2002**

Kode Rek.	Jenis Pendapatan	Target S/d Perubahan	Realisasi	%
1	2	3	4	5
1.1.1.	Pos sisa lebih perint angg tahun lalu	14,747,069,000.00	14,747,069,678.00	100.00%
1.2.	PENDAPATAN ASLI DAERAH			
1.2.1	Pos Pajak Daerah	3,679,918,000.00	4,334,366,800.00	117.78%
1.2.2.	Pos Retribusi Daerah	15,078,875,000.00	15,265,694,973.00	101.24%
1.2.3.	Bagian Laba B U M D	313,828,000.00	311,686,188.00	99.32%
1.2.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah	2,844,069,000.00	4,548,577,864.00	159.93%
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PADS)	21,916,690,000.00	24,460,325,825.00	111.61%
1.3	DANA PERIMBANGAN			
1.3.1	Pos Bagi Hasil Pajak	13,617,117,000.00	20,905,728,730.00	153.53%
1.3.2	Pos Bagi Hasil Bukan pajak	334,720,000.00	503,209,471.00	150.34%
1.3.3.	Pos Dana Alokasi Umum (DAU)	249,260,000,000.00	250,946,368,750.00	100.68%
1.3.4	Pos Dana Alokasi Khusus (DAK).	Up	Up	
1.3.5	Pos Dana Darurat	Up	Up	
	JUMLAH DANA PERIMBANGAN	263,211,837,000.00	272,355,306,951.00	103.47%
1.5	BAGIAN LAIN PENERIMAAN YANG SAH			
1.4	Bagian Pinjaman Daerah	Up	Up	
1.5	Bagian Pinjaman Dari Pusat	8,961,184,000.00	9,206,555,377.00	102.74%
	Bagian Penerimaan dari Propinsi	4,524,662,000.00	4,487,831,000.00	
	JUMLAH BAGIAN PENERIMAAN LAIN YG SAH	13,485,846,000.00	13,694,386,377.00	101.55%
	TOTAL PENDAPATAN (1.1 S/D 1.5)	308,836,780,000.00	320,769,257,831.00	103.86%

[sub.bag. pelaporan - dipenda]

Sumber :

Perhitungan Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Boyolali
Tahun Anggaran 2002 (Data diolah)

LAMPIRAN 3
TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN
KABUPATEN BOYOLALI
TAHUN 2003

\$\$
\$\$
\$\$
\$\$
\$\$
\$\$
\$\$
\$\$
\$\$
\$\$
\$\$
\$\$

DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI

~ sub.bag. Pelaporan ~

**TARGET DAN REALISASI PENERIMAAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2003
TAHUN 2003**

Kode Rek.	Jenis Pendapatan	Target Stl Perubahan	Realisasi	%
1	2	3	4	5
1.1.	BAGIAN SISA LEBIH PERHITUNGAN			
	ANGGARAN TAHUN YANG LALU			
1.1.1.	Pos sisa lebih perhit angg tahun lalu	0.00	0.00	
	JML BAG SISA LEBIH PERHIT ANG TH. LALU	0.00	0.00	
1.01.05.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH			
1.01.05.1.1	Pajak Daerah			
1.01.05.1.1.01.	Pajak Hotel	34,700,000.00	36,444,050.00	105.03%
1.01.05.1.1.02.	Pajak Restoran	92,600,000.00	93,644,314.00	101.13%
1.01.05.1.1.03.	Pajak Hiburan	8,550,000.00	10,005,050.00	117.02%
1.01.05.1.1.04.	Pajak Reklame	72,000,000.00	72,000,000.00	100.00%
1.01.05.1.1.05.	Pajak Penerangan Jalan	5,443,000,000.00	5,564,355,016.00	102.23%
1.01.05.1.1.06.	Pajak Pengel & Penggi Bhn Galian Gol C	35,419,000.00	43,879,256.00	123.89%
1.01.05.1.1.09.	Pajak Kendaraan Tdk Bermotor	375,000.00	447,500.00	0.00%
	JUMLAH POS PAJAK DAERAH	5,686,644,000.00	5,820,775,186.00	102.36%
1.00.00.1.2.	Retribusi Daerah			
1.05.01.1.2.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan			
1.05.02.1.2.02	- Dinas Kesehatan dan Sosial (DKK)	2,932,596,000.00	2,951,280,845.00	100.64%
1.05.02.1.2.01	- Badan RSU Pandan Arang	10,693,954,000.00	12,054,080,091.00	112.72%
1.00.00.1.2.02	Ret. Pelayanan Persampahan dan Kebersihan	240,699,950.00	240,031,200.00	99.72%
1.09.01.1.2.03	Ret. Penggantian Biaya Cetak KTP/KK	270,000,000.00	290,929,500.00	107.75%
1.09.01.1.2.04	Ret Penggantian Biaya Cetak Akte Cakil	318,750,000.00	299,503,000.00	93.96%
1.07.01.1.2.05	Retribusi Palayanan Pemakaman	3,000,000.00	3,025,000.00	100.83%
1.01.05.1.2.07	Ret. Parkir di tepi jalan Umum	37,576,800.00	37,815,000.00	100.63%
1.03.02.1.2.08	Ret. Pelayanan Pasar	1,342,232,800.00	1,323,858,850.00	98.63%
1.07.01.1.2.09	Ret. Pengujian Kendaraan Bermotor	307,205,000.00	335,256,000.00	109.13%
1.07.00.1.2.10	Ret. Pemeriksaan alat Pemadam Kebakaran	550,000.00	550,000.00	100.00%
1.00.00.1.2.13	Ret. Jasa Usaha Pemakaian Kekayaan Daerah	455,537,000.00	645,045,668.00	141.60%
1.01.05.1.2.16	Ret. Jasa Usaha Terminal	236,007,000.00	225,328,350.00	95.48%
1.01.05.1.2.17	Ret. Jasa Usaha Tempat Khusus Parkir	19,980,000.00	18,403,750.00	92.11%
1.02.02.1.2.20	Ret. Jasa Usaha Rumah Potong Hewan	486,750,000.00	457,068,100.00	93.90%
1.10.01.1.2.22	Ret Jasa Usaha Tempat Rek dan Olah Raga	217,250,000.00	243,448,435.00	112.06%
1.08.01.1.2.24	Ret Jasa Usaha Pengolahan Limbah Cair	5,500,000.00	5,827,050.00	105.95%
1.02.02.1.2.25	Ret. Jasa Usaha Produksi Daerah	15,000,000.00	15,047,000.00	100.31%
1.07.01.1.2.26	Ret. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	229,626,000.00	328,966,175.00	143.26%
1.01.14.1.2.28	Ret. Izin Gangguan	140,000,000.00	226,941,225.00	162.10%
1.07.01.1.2.30	Ret. Ijin Trayek	17,475,000.00	29,575,000.00	169.24%
1.02.00.1.2.32	Ret. Rice Mill / Ijin Usaha Perusahaan	21,000,000.00	28,528,750.00	135.85%
1.03.01.1.2.33	Ret. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	11,840,000.00	18,210,000.00	153.80%
1.03.01.1.2.34	Ret Surat Ijin Usaha Industri (SIUI)	20,000,000.00	24,305,000.00	121.53%
1.03.01.1.2.35	Ret. Tanda Daftar Gudang (TDP)	700,000.00	700,000.00	100.00%
1.00.00.1.2.36	Ret.Pely Adm Unt Mend dan Legalisasi Nsk Dir	111,058,500.00	68,710,168.00	61.87%
1.02.01.1.2.37	Ret.Ijin Pen Kayu di luar Kawasan Hutan	15,000,000.00	22,529,815.00	150.20%
1.00.00.1.2.38	Ret. Dol Lelang, Jemb Darurat, Andang Steger	68,000,000.00	294,320,400.00	432.82%
	Werk, Perancah Bagesting dan direksi Keet			
	JUMLAH POS RETRIBUSI	18,217,288,050.00	20,189,284,372.00	110.82%

[srb. bag pelaporan - dipenda]

Kode Rek	Jenis Pendapatan	Target Stl Perubahan	Realisasi	%
1	2	3	4	5
1.00.00.1.3	HASIL PERSH MILIK DAERAH DAN HASIL			
	PENGEL. KEKAYAAN DRH YG DIPSIKAN			
1.05.00.1.3.01	Bagian Laba Pershaan Milik Daerah/			
01	Persh Daerah Air Minum (PDAM)	54,943,799.00	54,943,799.00	100.00%
02	Apotek Baya Husada	17,500,000.00	17,500,000.00	100.00%
03	Percetakan Aneka Karya	11,000,000.00	11,000,000.00	100.00%
04	Pertokoan	5,000,000.00	5,000,000.00	100.00%
05	Bengkel Boyolali Motor	12,500,000.00	12,500,000.00	0.00%
	JML. BAGIAN LABA PERUSAHAAN MILIK DAERAH	100,943,799.00	100,943,799.00	100.00%
1.01.05.1.0.02	Bagian Laba Lembaga Keuangan Bank			
01	Bank Pembangunan Daerah (BPD)	0.00	0.00	0.00%
02	PD BPR Bank Pasar	148,994,250.00	148,994,250.00	100.00%
03	PD BPR BKK	87,352,000.00	87,352,000.00	100.00%
	JML. BAG. LABA LEMBAGA KEUANGAN BANK	236,346,250.00	236,346,250.00	100.00%
	JML. HASIL PERSH MILIK DAERAH & HSL PENGEL. KEKADA	337,290,049.00	337,290,049.00	100.00%
1.00.00.1.4	LAIN-LAIN PEND. ASLI DAERAH YANG SAH			
1.01.03.01.4.01	Hasil Penjualan Aset Daerah Yg tdk dipisahkan	5,153,000.00	5,277,050.00	102.41%
1.01.12.1.4.03	Penerimaan Jasa Giro	300,000,000.00	435,516,014.00	145.17%
1.00.00.1.4.04	Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah	242,868,894.00	332,170,297.00	136.77%
1.00.00.1.4.05	Penerimaan Bunga Deposito	5,062,500,000.00	5,657,702,180.00	111.76%
1.00.00.1.4.06	Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	141,216,000.00	1,412,160.00	1.00%
1.00.00.1.4.07	Pen Ganti Rugi Atas Kekada (TPT/GR)	1,225,000.00	1,878,000.00	153.31%
	JML. LAIN LAIN PEND. ASLI DAERAH YANG SAH	5,752,962,894.00	6,433,955,701.00	111.84%
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	29,994,184,993.00	32,781,305,308.00	109.29%
2	DANA PERIMBANGAN			
2.1	Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak			
2.1.01	Bagi Hasil Pajak			
01.05.2.1.01.01	Pajak Bumi dan Bangunan	5,809,335,000.00	10,411,208,732.00	179.22%
02	Bea Perolchan Hak Atas Tanah dan Bangunan	1,172,274,829.00	1,490,708,677.00	127.16%
03	Pajak Penghs Orang Pribadi (Termasuk Pph 21)	2,415,275,721.00	3,697,111,860.00	153.07%
	Jumlah Bagi Hasil Pajak	9,396,885,550.00	15,599,029,269.00	166.00%
2.1.02	Bagi Hasil Bukan Pajak Sumber Daya Alam			
05.01.2.1.02.01	Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	0.00	0.00	0.00%
02	Pen. Dari Sektor Pertambangan Migas	7,000,000.00	18,368,398.00	0.00%
03	Pen. Dari SDA Sektor Kehutanan	99,069,831.00	319,633,433.00	322.63%
04	Bagi Hasil Sektor Kelautan/Perikanan	478,723,405.00	433,912,048.00	90.64%
05	Bagi Hasil Sektor Pertambangan Umum	9,741,180.00	7,166,257.00	73.57%
	Jml. Bagi Hasil Bukan Pajak	594,534,416.00	779,080,136.00	131.04%
	JML. BAGI HASIL PAJAK & BUKAN PAJAK SDA	9,991,419,966.00	16,378,109,405.00	163.92%
2.2	Pos Dana Alokasi Umum (DAU)			
01.03.2.2.01.01	Dana Alokasi Umum	292,070,000,000.00	292,070,000,000.00	100.00%
	JML DANA ALOKASI UMUM	292,070,000,000.00	292,070,000,000.00	100.00%
2.3	Dana Alokasi Khusus (DAK)			
1.03.2.03.02.02	Dana Alokasi Khusus Non Reboisasi	5,500,000,000.00	5,500,000,000.00	100.00%
	JUMLAH DANA ALOKASI KHUSUS	5,500,000,000.00	5,500,000,000.00	100.00%
	JUMLAH DANA PERIMBANGAN	307,561,419,966.00	313,948,109,405.00	102.08%
2.4	Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keu. Propinsi			
2.4.01	Bagi Hasil Pajak Propinsi			
01.05.2.4.01.01	Pajak Kendaraan Bernotordan BBNKB	5,002,396,000.00	6,445,461,000.00	128.85%
03	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	2,246,009,250.00	4,205,755,562.00	187.25%
04	Pajak Pengamb. & Pemanf. Air Bawah Tanah	0.00	85,675,780.00	

Kode Rek.	Jenis Pendapatan	Target Sl Perubahan	Realisasi	%
1	2	3	4	5
2.4	Bagi Hasil Pajak dan Bant. Keu. Propinsi			
2.4.01	Bagi Hasil Pajak Propinsi			
01.05.2.4.01.01	Pajak Kendaraan Bermotor dan BBNKB	5,002,396,000.00	6,455,461,000.00	129.05%
03	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	2,246,009,250.00	4,205,755,562.00	187.25%
04	Pajak Pengam. & Pemanf. Air Bawah Tanah	0.00	85,675,780.00	
05	Pajak Peng. & Pemanf. Air Permukaan Tanah	0.00	2,937,500.00	
06	Bagi Hsl Kelebihan Muatan Jemb. Timbang	146,787,800.00	120,373,550.00	82.01%
07	Bagi Hsl Sunb. Pihak ke III Penj. Kayu	38,117,800.00	49,551,350.00	130.00%
JML BAGI HASIL PAJAK PROPINSI		7,433,310,850.00	10,919,754,742.00	146.00%
2.4.02	Bantuan Keuangan dari Propinsi			
01.03.2.4.02.01	Bantuan Keuangan Dari Propinsi (2P0A)	4,570,627,000.00	4,610,139,000.00	100.86%
	Cadangan			
JML. BANTUAN KEUANGAN DARI PROPINSI		4,570,627,000.00	4,610,139,000.00	100.86%
JML.BG.HSL PJKPROPINSI & BANT.KEU.DR.PROPINSI		12,003,937,850.00	15,546,331,242.00	129.51%
3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH			
3.1.02	Bant. Dana Kontj/Penyelimbang & Pemerintah			
1.01.0307.3.1.0	Bantuan Keuangan Untuk Pembangunan	0.00	0.00	
02	Dana Penyeimbang dari Pemerintah Pusat	25,029,880,000.00	25,029,881,000.00	100.00%
03	Restitusi PPh Pasal 21	1,941,255,336.00	1,941,255,336.00	100.00%
JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH		26,971,135,336.00	26,971,136,336.00	100.00%
TOTAL PENDAPATAN (1.1 S/D 1.5)		376,535,307,145.00	389,246,882,291.00	103.38%

Sumber :

[sub.bag ,pelaporan - dipenda]

Perhitungan Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Boyolali
Tahun Anggaran 2003 (Data diolah)

**REKAPITULASI TARGET DAN REALISASI PENERIMAAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BOYOLALI
TAHUN 2003**

Kode Rek.	Jenis Pendapatan	Target Stl Perubahan	Realisasi	%
1	2	3	4	5
1.1	BAGIAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGG. TAHUN YANG LALU			
1.1.1	Pos sisa lebih perhit angg tahun lalu	0.00	0.00	
	JML. SISA LBH PERH. ANGG. THN YG LALU			
1.01.05.1	BAG. PENDAPATAN ASLI DAERAH			
1.1	Pajak Daerah	5,686,644,000.00	5,820,775,186.00	102.36%
1.2	Retribusi Daerah	18,217,288,050.00	20,189,284,372.00	110.82%
1.3.1	Bagian Laba Pershaan Milik Daerah	100,943,799.00	100,943,799.00	100.00%
1.3.2	Bagian Laba Lembaga Keuangan Bank	236,346,250.00	236,346,250.00	100.00%
1.4	Lain-lain Pendapatan Asli daerah yang Sah	5,752,962,894.00	6,433,955,701.00	111.84%
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	29,994,184,993.00	32,781,305,308.00	109.29%
2	DANA PERIMBANGAN			
2.1.01	Bagi Hasil Pajak	9,396,885,550.00	15,599,029,269.00	166.00%
2.1.02	Bagi Hasil Bukan Pajak Sumber Daya Alam	594,534,416.00	779,080,136.00	131.04%
2.2.01	Pos Dana Alokasi Umum (DAU)	292,070,000,000.00	292,070,000,000.00	100.00%
2.3.01	Dana Alokasi Khusus Non Reboisasi	5,500,000,000.00	5,500,000,000.00	100.00%
	JUMLAH DANA PERIMBANGAN	307,561,419,966.00	313,948,109,405.00	102.08%
2.4	BAGI HASIL PAJAK DAN BANT. KEU DR PROP.			
2.4.01	Bagi Hasil Pajak Propinsi	7,433,310,850.00	10,936,192,242.00	147.12%
2.4.02	Bantuan Keuangan dari Propinsi	4,570,627,000.00	4,610,139,000.00	100.86%
	JML. BG HASIL PAJAK DAN BANT. KEU DR PROPINSI	12,003,937,850.00	15,546,331,242.00	129.51%
3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH			
3.1	Bant. Dana Kontj/Penyimbang & Pemerintah	26,971,135,336.00	26,971,136,336.00	100.00%
	TOTAL PENDAPATAN	376,530,678,145.00	389,246,882,291.00	103.38%

[sub bag. Pelaporan - dipenda]

Sumber :

Perhitungan Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Boyolali
Tahun Anggaran 2003 (Data diolah)

LAMPIRAN 4

TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN
KABUPATEN BOYOLALI
TAHUN 2004

\$\$
\$\$
\$\$
\$\$
\$\$
\$\$
\$\$
\$\$
\$\$
\$\$
\$\$
\$\$
\$\$

DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI

~ sub.bag. Pelaporan ~

**TARGET DAN REALISASI PENERIMAAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BOYOLALI
TAHUN 2004**

Kode Rek.	Jenis Pendapatan	Target Srl Perubahan	Realisasi	%
1	2	4	5	6
1.1.	BAGIAN SISA LEBIH PERHITUNGAN			
	ANGGARAN TAHUN YANG LALU			
1.1.1.	Pos sisa lebih perhit angg tahun lalu	0.00	0.00	
JML BAG SISA LEBIH PERHIT ANG TH. LALU		0.00	0.00	
1.01.05.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH			
1.01.05.1.1	Pajak Daerah			
1.01.05.1.1.01.	Pajak Hotel	37,900,000.00	42,738,850.00	112.77%
1.01.05.1.1.02	Pajak Restoran	94,300,000.00	87,843,250.00	93.15%
1.01.05.1.1.03	Pajak Hiburan	6,270,000.00	10,243,600.00	163.37%
1.01.05.1.1.04	Pajak Reklame	72,200,000.00	72,200,000.00	100.00%
1.01.05.1.1.05	Pajak Penerangan Jalan	5,800,000,000.00	6,959,690,096.00	119.99%
1.01.05.1.1.06	Pajak Pengel & Penggl Bhn Galian Gol C	40,065,000.00	71,384,950.00	178.17%
1.01.05.1.1.07	Pajak Parkir	0.00	0.00	0.00%
JUMLAH POS PAJAK DAERAH		6,050,735,000.00	7,244,100,746.00	119.72%
1.00.00.1.2.	Retribusi Daerah			
1.05.01.1.2.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan			
1.05.02.1.2.02	- Dinas Kesehatan dan Sosial (DKK)	3,332,596,000.00	4,116,179,466.00	123.51%
1.05.02.1.2.01	- Badan RSUD Pandan Arang	13,163,850,000.00	14,057,752,424.00	106.79%
1.00.00.1.2.02	Ret. Pelayanan Persampahan dan Kebersihan	251,646,800.00	259,401,350.00	103.08%
1.09.01.1.2.03	Ret. Penggantian Biaya Cetak KTP/KK	270,000,000.00	303,775,500.00	112.51%
1.09.01.1.2.04	Ret Penggantian Biaya Cetak Akte Capil	200,000,000.00	267,799,500.00	133.90%
1.07.01.1.2.05	Retribusi Pelayanan Pemakaman	4,500,000.00	7,430,000.00	165.11%
1.01.00.1.2.07	Ret. Parkir di tepi jalan Umum	40,648,000.00	41,269,000.00	101.53%
1.03.02.1.2.08	Ret. Pelayanan Pasar	1,338,458,200.00	1,508,593,800.00	112.71%
1.07.01.1.2.09	Ret. Pengujian Kendaraan Bermotor	316,885,000.00	363,010,500.00	114.56%
1.07.00.1.2.10	Ret. Pemeriksaan alat Pemadam Kebakaran	550,000.00	550,000.00	100.00%
1.00.00.1.2.13	Ret. Jasa Usaha Pemakaian Kekayaan Daerah	3,434,603,300.00	1,710,497,411.00	49.80%
1.01.05.1.2.16	Ret. Jasa Usaha Terminal	262,188,500.00	235,664,800.00	89.88%
1.01.05.1.2.17	Ret. Jasa Usaha Tempat Khusus Parkir	18,740,000.00	21,190,500.00	113.08%
1.03.02.1.2.20	Ret. Jasa Usaha Rumah Potong Hewan	445,000,000.00	496,471,000.00	111.57%
1.10.01.1.2.22	Ret. Jasa Usaha Tempat Rek dan Olah Raga	388,570,000.00	439,893,290.00	113.21%
1.08.01.1.2.24	Ret. Jasa Usaha Pengolahan Limbah Cair	5,000,000.00	5,251,570.00	105.03%
1.03.02.1.2.25	Ret. Jasa Usaha Produksi Daerah	15,000,000.00	15,012,500.00	100.08%
1.07.01.1.2.26	Ret. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	278,944,000.00	367,157,755.00	131.62%
1.01.14.1.2.28	Ret. Izin Gangguan	190,000,000.00	228,234,935.00	120.12%
1.01.14.1.2.29	Ret. Izin Tempat Usaha	10,000,000.00	21,906,062.00	219.06%
1.09.01.1.2.30	Ret. Ijin Travel	21,200,000.00	33,340,000.00	157.26%
1.02.00.1.2.32	Ret. Rice Mill / Ijin Usaha Perusahaan	25,000,000.00	26,176,250.00	104.71%

Kode Rek.	Jenis Pendapatan	Target Std Perubahan	Realisasi	%
1	2	3	4	5
1.03.01.1.2.33	Ret. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	8,880,000.00	17,760,000.00	200.00%
1.03.01.1.2.34	Ret Surat Ijin Usaha Industri (SIUI)	10,000,000.00	19,655,000.00	196.55%
1.03.01.1.2.35	Ret. Tanda Daftar Gudang (TDP)	500,000.00	605,000.00	121.00%
1.00.00.1.2.36	Ret.Pely Adm Unt Mend dan Legalisasi Nsk Din.	65,869,340.00	67,800,558.00	102.93%
1.02.01.1.2.37	Ret.Ijin Pen Kayu di luar Kawasan Hutan	75,000,000.00	207,000,950.00	276.00%
1.00.00.1.2.38	Ret. Dol Lelang, Jemb Darurat, Andang Steger	185,000,000.00	275,919,817.00	149.15%
	Werk, Perancah Bagesting dan direksi Keet			
1.02.02.1.2.39	Ret. Pemeriksaan Kualitas Susu	63,000,000.00	46,285,900.00	73.47%
1.02.02.1.2.40	Ret. Pelayanan Inseminasi Buatan	12,000,000.00	12,141,000.00	101.18%
1.02.02.1.2.41	Ret. Pelayanan Kesehatan Hewan	15,000,000.00	15,050,000.00	100.33%
1.07.01.1.2.42	Ret. Pengujian & Nomor Kend. Tidak Bermotor	375,000.00	376,000.00	100.27%
1.02.01.1.2.43	Ret. Pemanfaatan Sarang Burung Walet	4,500,000.00	465,900.00	10.35%
JUMLAH POS RETRIBUSI		24,453,504,140.00	25,189,617,738.00	103.01%
1.00.00.1.3	HASIL PERSH.MILIK DAERAH DAN HASIL			
	PENGEL. KEKAYAAN DRH YG DIPSHKAN			
1.05.00.1.3.01	Bagian Laba Pershaan Milik Daerah			
01	Persh Daerah Air Minum (PDAM)	150,000,000.00	150,000,000.00	100.00%
02	Apotek Bayer Husada	20,693,000.00	20,693,303.00	100.00%
03	Percetakan Aneka Karya	16,501,000.00	16,501,614.00	100.00%
04	Pertokoan	7,089,000.00	7,089,441.00	100.01%
05	Bengkel Boyolali Motor	0.00	0.00	0.00%
JML. BAGIAN LABA PERUSAHAAN MILIK DAERAH		194,283,000.00	194,284,358.00	100.00%
1.01.05.1.0.02	Bagian Laba Lembaga Keuangan Bank			
01	Bank Pembangunan Daerah (BPD)	0.00	0.00	0.00%
02	PD BPR Bank Pasar	244,271,700.00	244,271,700.00	100.00%
03	PD BPR BKK	75,843,000.00	76,911,865.00	101.41%
JML. BAG. LABA LEMBAGA KEUANGAN BANK		320,114,700.00	321,183,565.00	100.33%
JML. HASIL PERSH MILIK DAERAH & HSL PENGEL. KEKAD		514,397,700.00	515,467,923.00	100.21%
1.00.00.1.4	LAIN-LAIN PEND ASLI DAERAH YANG SAH			
1.01.03.01.4.01	Hasil Penjualan Aset Daerah Yg tdk dipisahkan	112,118,000.00	440,076,800.00	392.51%
1.01.12.1.4.03	Penerimaan Jasa Giro	316,000,000.00	457,434,571.00	144.76%
1.00.00.1.4.04	Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah	493,226,725.00	727,021,540.00	147.40%
1.00.00.1.4.05	Penerimaan Bunga Deposito	1,877,104,857.00	2,370,963,145.00	126.31%
1.00.00.1.4.06	Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	1,412,000.00	26,000,000.00	1841.36%
1.00.00.1.4.07	Pen Ganti Rugi Atas Kekada (TPT/GR)	1,225,000.00	0.00	0.00%
JML. LAIN LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH		2,801,086,582.00	4,021,496,056.00	143.57%
JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		33,819,723,422.00	36,970,682,463.00	109.32%
2	DANA PERIMBANGAN			
2.1	Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak			
2.1.01	Bagi Hasil Pajak			
1.01.05.2.1.01.01	Pajak Bumi dan Bangunan	5,959,335,000.00	14,126,771,330.00	237.05%
02	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	1,189,301,202.00	2,010,488,683.00	169.05%
03	Pajak Penghs Orang Pribadi (Termasuk Pph 21)	3,697,111,860.00	2,497,031,134.00	67.54%
	Jumlah Bagi Hasil Pajak	10,845,748,062.00	18,634,291,147.00	171.81%

Kode Rek.	Jenis Pendapatan	Target Std Perubahan	Realisasi	%
1	2	3	4	5
2.1.02	Bagi Hasil Bukan Pajak Sumber Daya Alam			
1.05.01.2.1.02.01	Provisi Sumber Daya Hutan (PSDII)	0.00	0.00	0.00%
02	Pen. Dari Sektor Pertambangan Migas	7,000,000.00	0.00	0.00%
03	Pen. Dari SDA Sektor Kehutanan	99,069,831.00	219,751,169.00	221.81%
04	Bagi Hasil Sektor Kelautan/Perikanan	433,912,048.00	529,030,323.00	121.92%
05	Bagi Hasil Sektor Pertambangan Umum	7,166,257.00	1,834,729.00	25.60%
	Jml. Bagi Hasil Bukan Pajak	547,148,136.00	750,616,221.00	137.19%
	JML. BAGI HASIL PAJAK & BUKAN PAJAK SDA	11,392,896,198.00	19,384,907,368.00	170.15%
2.2	Pos Dana Alokasi Umum (DAU)			
1.01.03.2.2.01.01	Dana Alokasi Umum	300,180,000,000.00	303,635,553,000.00	101.15%
	JML. DANA ALOKASI UMUM	300,180,000,000.00	303,635,553,000.00	101.15%
2.3	Dana Alokasi Khusus (DAK)			
01.03.2.03.01.02	Dana Alokasi Khusus Non Reboisasi	6,920,000,000.00	6,920,000,000.00	100.00%
	JUMLAH DANA ALOKASI KHUSUS	6,920,000,000.00	6,920,000,000.00	100.00%
	JUMLAH DANA PERIMBANGAN	318,492,896,198.00	329,940,460,368.00	103.59%
2.4	Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keu. Propinsi			
2.4.01	Bagi Hasil Pajak Propinsi			
1.01.05.2.4.01.01	Pajak Kendaraan Bermotor/PKB	2,693,788,920.00	4,338,738,420.00	161.06%
02	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor/BBNKB	3,300,727,080.00	3,702,682,080.00	112.18%
03	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	3,281,436,000.00	3,566,132,340.00	108.68%
04	Pajak Pengambilan & Pemanf. Air Bawah Tanah	127,440,000.00	138,436,000.00	108.63%
05	Pajak Peng. & Pemanf. Air Permukaan Tanah	64,641,000.00	86,085,000.00	133.17%
06	Bagi Hsl Kelebihan Muatan Jemb. Timbang	155,174,000.00	184,916,421.00	119.17%
07	Bagi Hsl Sumb. Pihak ke III Penj. Kayu	46,029,000.00	54,650,500.00	118.73%
08	Penerimaan Hasil Bagi Tera Ulang	0.00	8,872,799.00	0.00%
	JML BAGI HASIL PAJAK PROPINSI	9,669,236,000.00	12,080,513,560.00	124.94%
2.4.02	Bantuan Keuangan dari Propinsi			
1.01.03.2.4.02.01	Bantuan Keuangan Dari Propinsi (2P0A)	1,859,318,000.00	1,859,318,000.00	100.00%
	JML. BANTUAN KEUANGAN DARI PROPINSI	1,859,318,000.00	1,859,318,000.00	100.00%
	JML.BG.HSL.PJKPROPINSI & BANT.KEU.DR.PROPINSI	11,528,554,000.00	13,939,831,560.00	120.92%
3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH			
3.1.02	Bant. Dana Kontj/Penyeimbang & Pemerintah			
01	Dana Penyeimbang dari Pemerintah Pusat	0.00	0.00	#DIV/0!
02	Restitusi PPh Pasal 21	23,207,866,000.00	19,335,000,000.00	83.31%
03	Bantuan dana Pilkada	2,850,000,000.00	2,863,077,920.00	100.46%
	JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	26,057,866,000.00	22,198,077,920.00	85.19%
	JUMLAH PENDAPATAN	389,899,039,620.00	403,049,052,311.00	103.37%

Sumber :

[Sub.Bag.Pelaporan - Dipenda]

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Boyolali

Pereode yang berakhir tanggal 31 Desember 2004 (Data diolah)

**REKAPITULASI TARGET DAN REALISASI PENERIMAAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2004**

Kode Rek.	Jenis Pendapatan	Target Stl Perubahan	Realisasi	%
1	2	4	5	6
1.1.1.	Pos sisa lebih perhit angg tahun lalu	0.00	0.00	
JUMLAH SISA LEBIH PERHIT.ANGG. TAHUN LALU		0.00	0.00	
1.01.05.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH			
1.1	Pajak Daerah	6,050,735,000.00	7,244,100,746.00	119.72%
1.2	Retribusi Daerah	24,453,504,143.00	25,189,617,742.00	103.01%
1.3.1	Bagian Laba Pershaan Milik Daerah	194,283,000.00	194,284,358.00	100.00%
1.3.2	Bagian Laba Lembaga Keuangan Bank	320,114,700.00	321,183,565.00	100.33%
1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	2,801,086,582.00	4,021,496,056.00	143.57%
JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		33,819,723,425.00	36,970,682,467.00	109.32%
2	DANA PERIMBANGAN			
2.1.01	Bagi Hasil Pajak	10,845,748,062.00	18,634,291,147.00	171.81%
2.1.02	Bagi Hasil Bukan Pajak Sumber Daya Alam	547,148,136.00	750,616,221.00	137.19%
2.2.01	Pos Dana Alokasi Umum (DAU)	300,180,000,000.00	303,635,553,000.00	101.15%
2.3.01	Dana Alokasi Khusus (DAK)	6,920,000,000.00	6,920,000,000.00	100.00%
JUMLAH DANA PERIMBANGAN		318,492,896,198.00	329,940,460,368.00	103.59%
3	BAGI HSL PJK DAN BANT KEU DR PROVINSI			
2.4.01	Bagi Hasil Pajak Provinsi	9,669,236,000.00	12,080,513,560.00	124.94%
2.4.02	Bantuan Keuangan dari Provinsi	1,859,318,000.00	1,859,318,000.00	100.00%
JML. BG HSL PAJAK DAN BANT KEU DARI PROVINSI		11,528,554,000.00	13,939,831,560.00	120.92%
3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	26,057,866,000.00	22,198,077,920.00	85.19%
JUMLAH PENDAPATAN		389,899,039,620.00	403,049,053,311.00	103.37%

[Sub.Bag.Pelaporan - Dipenda]

Sumber :

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Boyolali
Periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2004 (Data diolah)

LAMPIRAN 5

TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN
KABUPATEN BOYOLALI
TAHUN 2005

\$\$
\$\$
\$\$
\$\$
\$\$
\$\$
\$\$
\$\$
\$\$
\$\$
\$\$
\$\$

DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI

~ sub.bag. Pelaporan ~

**TARGET DAN REALISASI PENERIMAAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BOYOLALI
TAHUN 2005**

Kode Rek.	Jenis Pendapatan	Target Stl Perubahan	Realisasi	%
1	2	3	4	5
1.1.	BAGIAN SISA LEBIH PERHITUNGAN			
	ANGGARAN TAHUN YANG LALU			
1.1.1.	Pos sisa lebih perhit angg tahun lalu	0.00	0.00	
JML BAG SISA LEBIH PERHIT ANG TH. LALU		0.00	0.00	
1.01.05.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH			
1.01.05.1.1	Pajak Daerah			
1.01.05.1.1.01.	Pajak Hotel	41,807,000.00	46,675,700.00	111.65%
1.01.05.1.1.02	Pajak Restoran	94,700,000.00	95,516,000.00	100.86%
1.01.05.1.1.03	Pajak Hiburan	4,950,000.00	5,348,300.00	108.05%
1.01.05.1.1.04	Pajak Reklame	94,200,000.00	123,182,990.00	130.77%
1.01.05.1.1.05	Pajak Penerangan Jalan	6,380,500,000.00	6,570,434,557.00	102.98%
1.01.05.1.1.06	Pajak Pengel & Penggl Bhn Galian Gol C	60,316,800.00	142,082,650.00	235.56%
1.01.05.1.1.07	Pajak Parkir	500,000.00	820,000.00	0.00%
JUMLAH POS PAJAK DAERAH		6,676,973,800.00	6,984,060,197.00	104.60%
1.00.00.1.2.	Retribusi Daerah			
1.05.01.1.2.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan			
1.05.02.1.2.02	- Dinas Kesehatan dan Sosial (DKK)	3,987,896,000.00	4,180,574,769.00	104.83%
1.05.02.1.2.01	- Badan RSU Pandan Arang	14,345,678,000.00	15,578,050,560.00	108.59%
1.00.00.1.2.02	Ret. Pelayanan Persampahan dan Kebersihan	255,640,800.00	268,481,425.00	105.02%
1.09.01.1.2.03	Ret. Penggantian Biaya Cetak KTP/KK	575,000,000.00	903,359,000.00	157.11%
1.09.01.1.2.04	Ret Penggantian Biaya Cetak Akte Capil	279,000,000.00	324,689,500.00	116.38%
1.07.01.1.2.05	Retribusi Palayanan Pemakaman	5,000,000.00	8,355,000.00	167.10%
1.01.05.1.2.07	Ret. Parkir di tepi jalan Umum	43,320,000.00	43,520,000.00	100.46%
1.03.02.1.2.08	Ret. Pelayanan Pasar	1,421,209,200.00	1,543,148,600.00	108.58%
1.07.01.1.2.09	Ret. Pengujian Kendaraan Bermotor	351,105,000.00	399,419,000.00	113.76%
1.07.00.1.2.10	Ret. Pemeriksaan alat Pemadam Kebakaran	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00%
1.00.00.1.2.13	Ret. Jasa Usaha Pemakaian Kekayaan Daerah	12,871,923,600.00	8,031,850,588.00	62.40%
1.01.05.1.2.16	Ret. Jasa Usaha Terminal	262,188,500.00	257,363,300.00	98.16%
1.01.05.1.2.17	Ret. Jasa Usaha Tempat Khusus Parkir	22,610,000.00	24,575,000.00	108.69%
1.02.02.1.2.20	Ret. Jasa Usaha Rumah Potong Hewan	467,250,000.00	482,237,700.00	103.21%
1.10.01.1.2.22	Ret Jasa Usaha Tempat Rek dan Olah Raga	452,556,000.00	444,739,210.00	98.27%
1.08.01.1.2.24	Ret Jasa Usaha Pengolahan Limbah Cair	6,025,000.00	5,409,165.00	89.78%
1.02.02.1.2.25	Ret. Jasa Usaha Produksi Daerah	15,000,000.00	15,026,000.00	100.17%
1.07.01.1.2.26	Ret. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	597,154,000.00	775,446,850.00	129.86%
1.01.14.1.2.28	Ret. Izin Gangguan	337,500,000.00	283,566,093.00	84.02%
1.01.14.1.2.29	Ret. Izin Tempat Usaha	12,500,000.00	24,069,125.00	192.55%
1.07.01.1.2.30	Ret. Ijin Trayek	25,450,000.00	29,270,000.00	115.01%
1.03.01.1.2.31	Ret. Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)	18,350,000.00	26,935,000.00	
1.02.00.1.2.32	Ret. Rice Mill / Ijin Usaha Perusahaan	25,000,000.00	26,813,750.00	107.26%
1.03.01.1.2.33	Ret. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	14,500,000.00	21,295,000.00	146.86%
1.03.01.1.2.34	Ret Surat Ijin Usaha Industri (SIUI)	10,020,000.00	10,140,000.00	101.20%
1.03.01.1.2.35	Ret. Tanda Daftar Gudang (TDP)	600,000.00	495,000.00	82.50%
1.00.00.1.2.36	Ret.Pely Adm Unt Mend dan Legalisasi Nsk Din.	41,287,340.00	69,687,160.00	168.79%
1.02.01.1.2.37	Ret. Ijin Pen Kayu di luar Kawasan Hutan	140,000,000.00	295,948,000.00	211.39%
1.00.00.1.2.38	Ret. Dol Lelang, Jemb Darurat, Andang Steger Werk, Perancah Bagesting dan direksi Keet	211,750,000.00	374,069,375.00	176.66%
1.02.02.1.2.39	Ret. Pemeriksaan Kualitas Susu	45,000,000.00	45,000,000.00	100.00%
1.02.02.1.2.40	Ret. Pelayanan Inseminasi Buatan	14,000,000.00	16,716,000.00	119.40%
1.02.02.1.2.41	Ret. Pelayanan Kesehatan Hewan	15,000,000.00	15,000,000.00	100.00%
1.07.01.1.2.42	Ret. Pengujian & Nomor Kend. Tidak Bermotor	375,000.00	380,000.00	101.33%
1.02.01.1.2.43	Ret. Pemanfaatan Sarang Burung Walet	500,000.00	1,109,800.00	221.96%
1.05.01.1.2.44	Ret. Pelayanan Kesehatan Swasta	30,000,000.00	52,175,000.00	173.92%
JUMLAH POS RETRIBUSI		36,901,388,440.00	34,579,914,970.00	93.71%

Kode Rek.	Jenis Pendapatan	Angg. Sl Perubahan	Realisasi	%
1	2	3	4	5
1.00.00.1.3	HASIL PERSH.MILIK DAERAH DAN HASIL PENGEL. KEKAYAAN DRII YG DIPSIKAN			
1.05.00.1.3.01	Bagian Laba Pershaan Milik Daerah			
01	Persh Daerah Air Minum (PDAM)	225,000,000.00	225,000,000.00	100.00%
02	Apotek Baya Husada	43,462,708.00	43,462,733.00	100.00%
03	Percetakan Aneka Karya	23,126,254.00	23,126,254.00	100.00%
04	Pertokoan	17,487,237.00	17,487,238.00	100.00%
05	Bengkel Boyolali Motor	12,500,000.00	12,500,000.00	0.00%
JML. BAGIAN LABA PERUSAHAAN MILIK DAERAH		321,576,199.00	321,576,225.00	100.00%
1.01.05.1.0.02	Bagian Laba Lembaga Keuangan Bank			
01	Bank Pembangunan Daerah (BPD)	0.00	0.00	0.00%
02	PD BPR Bank Pasar	322,875,000.00	323,084,500.00	100.06%
03	PD BPR BKK	99,981,000.00	93,852,492.00	93.87%
04	Bagian Laba atas Penyertaan Modal/Investasi	2,362,000,000.00	2,688,000,000.00	113.80%
JML. BAG. LABA LEMBAGA KEUANGAN BANK		2,784,856,000.00	3,104,936,992.00	111.49%
JML. HASIL PERSH MILIK DAERAH & HSL PENGEL. KEKADA		3,106,432,199.00	3,426,513,217.00	110.30%
1.00.00.1.4	LAIN-LAIN PEND. ASLI DAERAH YANG SAH			
1.01.03.01.4.01	Hasil Penjualan Aset Daerah Yg tdk dipisahkan	48,500,000.00	48,500,000.00	100.00%
1.01.12.1.4.03	Penerimaan Jasa Giro	330,191,000.00	588,020,065.00	178.08%
1.00.00.1.4.04	Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah	362,091,640.00	701,205,667.00	193.65%
1.00.00.1.4.05	Penerimaan Bunga Deposito	2,952,227,327.00	3,482,457,605.00	117.96%
1.00.00.1.4.06	Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0.00	4,934,362.00	#DIV/0!
1.00.00.1.4.07	Pen Ganti Rugi Atas Kekada (TPT/GR)	1,300,000.00	1,300,000.00	100.00%
JML. LAIN LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH		3,694,309,967.00	4,826,417,699.00	130.64%
JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		50,379,104,406.00	49,816,906,083.00	98.89%
2	DANA PERIMBANGAN			
2.1	Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak			
2.1.01	Bagi Hasil Pajak			
1.01.05.2.1.01.01	Pajak Bumi dan Bangunan	7,450,000,000.00	17,787,739,667.00	238.76%
02	Bea Perolchan Hak Atas Tanah dan Bangunan	1,150,000,000.00	2,300,947,222.00	200.08%
03	Pajak Penghs Orang Pribadi (Termasuk Pph 21)	2,300,000,000.00	2,577,886,824.00	112.08%
Jumlah Bagi Hasil Pajak		10,900,000,000.00	22,666,573,713.00	207.95%
2.1.02	Bagi Hasil Bukan Pajak Sumber Daya Alam			
1.05.01.2.1.02.01	Provisi Sumber Daya Hutem (PSDII)	0.00	0.00	0.00%
02	Pen. Dari Sektor Pertambangan Migas	0.00	0.00	0.00%
03	Pen. Dari SDA Sektor Kehutanan	100,000,000.00	137,178,599.00	137.18%
04	Bagi Hasil Sektor Kelautan/Perikanan	150,000,000.00	318,317,098.00	212.21%
05	Bagi Hasil Sektor Pertambangan Umum	0.00	9,558,731.00	#DIV/0!
Jml. Bagi Hasil Bukan Pajak		250,000,000.00	465,054,428.00	186.02%
JML. BAGI HASIL PAJAK & BUKAN PAJAK SDA		11,150,000,000.00	23,131,628,141.00	207.46%
2.2	Pos Dana Alokasi Umum (DAU)			
1.01.02.2.2.01.01	Dana Alokasi Umum	313,080,000,000.00	313,078,000,000.00	100.00%
JML DANA ALOKASI UMUM		313,080,000,000.00	313,078,000,000.00	100.00%
2.3	Dana Alokasi Khusus (DAK)			
1.01.03.2.03.02.02	Dana Alokasi Khusus Non Reboisasi	11,710,000,000.00	11,710,000,000.00	100.00%
JUMLAH DANA ALOKASI KHUSUS		11,710,000,000.00	11,710,000,000.00	100.00%
JUMLAH DANA PERIMBANGAN		335,940,000,000.00	347,919,628,141.00	104.76%

[sub.bag. pelaporan - dipenda]

Kode Rek.	Jenis Pendapatan	Angg. Stl Perubahan	Realisasi	%
1	2	3	4	5
2.4	Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keu. Provinsi			
2.4.01	Bagi Hasil Pajak Provinsi			
1.01.05.2.4.01.01	Pajak Kendaraan Bermotor/PKB	3,400,000,000.00	5,205,834,339.00	153.11%
02	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor/BBNKB	4,400,000,000.00	6,702,844,707.00	152.34%
03	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	2,500,000,000.00	4,532,917,604.00	181.32%
04	Pajak Pengambilan & Pemanf. Air Bawah Tanah	100,000,000.00	108,713,191.00	108.71%
05	Pajak Peng. & Pemanf. Air Permukaan Tanah	24,000,000.00	27,249,288.00	113.54%
06	Bagi Hsl Kelebihan Muatan Jemb. Timbang	160,000,000.00	168,068,104.00	105.04%
07	Bagi Hsl Sumb. Pihak ke III Penj. Kayu	46,000,000.00	64,761,007.00	140.78%
08	Penerimaan Hasil Bagi Tera Ulang	10,000,000.00	10,354,128.00	0.00%
	JML. BAGI HASIL PAJAK PROVINSI	10,640,000,000.00	16,920,742,368.00	158.99%
2.4.02	Bantuan Keuangan dari Provinsi			
1.01.03.2.4.02.01	Bantuan Keuangan Dari Propinsi (2P0A)	1,906,036,000.00	1,906,036,000.00	100.00%
	Cadangan			
	JML. BANTUAN KEUANGAN DARI PROVINSI	1,906,036,000.00	1,906,036,000.00	100.00%
	JML.BG.HSL. PJKPROVINSI & BANT.KEU.DR.PROVINSI	12,546,036,000.00	18,726,778,368.00	149.26%
3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH			
3.1.02	Bant. Dana Kontj/Penyeimbang & Pemerintah			
1.01.0307.3.1.02.01	Dana Penyeimbang dari Pemerintah Pusat	17,450,000,000.00	17,454,000,000.00	100.02%
02	Restitusi PPh Pasal 21	2,488,000,000.00	988,745,173.00	39.74%
	Cadangan	4,339,270,000.00	4,339,270,000.00	100.00%
	JML. LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	24,277,270,000.00	22,782,015,173.00	93.84%
	JML. PENDAPATAN	423,142,410,406.00	439,245,327,765.00	103.81%

[sub. bag. pelaporan - dipenda]

Sumber :

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Boyolali

Periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2005 (Data diolah)

**REKAPITULASI TARGET DAN REALISASI PENERIMAAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BOYOLALI
TAHUN 2005**

Kode Rek.	Jenis Pendapatan	Target Stl Perubahan	Realisasi	%
1	2	4	5	6
1.1.	BAGIAN SISA LEBIH PERHITUNGAN			
	ANGGARAN TAHUN YANG LALU			
1.1.1.	Pos sisa lebih perhit angg tahun lalu	0.00	0.00	
	JML BAG SISA LEBIH PERHIT ANG TH. LALU	0.00	0.00	
1.01.05.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH			
1.01.05.1.1	Pajak Daerah	6,676,973,800.00	6,984,060,197.00	104.60%
1.00.00.1.2.	Retribusi Daerah	36,901,388,440.00	34,579,914,970.00	93.71%
1.05.00.1.3.01	Bagian Laba Pershaan Milik Daerah	321,576,199.00	321,576,225.00	100.00%
1.01.05.1.0.02	Bagian Laba Lembaga Keuangan Bank	2,784,856,000.00	3,104,936,992.00	111.49%
1.00.00.1.4	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	3,694,309,967.00	4,826,417,699.00	130.64%
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	50,379,104,406.00	49,816,906,083.00	98.88%
2	DANA PERIMBANGAN			
2.1.01	Bagi Hasil Pajak	10,900,000,000.00	22,666,573,713.00	207.95%
2.1.02	Bagi Hasil Bukan Pajak Sumber Daya Alam	250,000,000.00	465,054,428.00	186.02%
2.2	Pos Dana Alokasi Umum (DAU)	313,080,000,000.00	313,078,000,000.00	100.00%
2.3	Dana Alokasi Khusus (DAK)	11,710,000,000.00	11,710,000,000.00	100.00%
	JUMLAH DANA PERIMBANGAN	335,940,000,000.00	347,919,628,141.00	103.57%
2.4	Bagi hsl pjg dan Bant. Keu dari Provinsi			
2.4.01	Bagi Hasil Pajak Propinsi	10,640,000,000.00	16,820,742,368.00	158.09%
2.4.02	Bantuan Keuangan dari Propinsi	1,906,036,000.00	1,906,036,000.00	100.00%
	JUMLAH BAGI HASIL PAJAK PROV. DAN BANT KEU PROV.	12,546,036,000.00	18,726,778,368.00	149.26%
3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH			
	.../Penyimbang & Pemerintah	24,277,270,000.00	22,782,015,173.00	93.84%
	JUMLAH BAGIAN LAIN PENERIMAAN YG SAH	24,277,270,000.00	22,782,015,173.00	93.84%
	JUMLAH PENDAPATAN	423,142,410,406.00	439,245,327,765.00	103.81%

[sub.bag. pelaporan - dipenda]

Sumber
Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Boyolali
Periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2005 (Data diolah)

LAMPIRAN 6
DAFTAR TABEL-TABEL

Tabel

Jumlah Realisasi pendapatan sektor Pariwisata berdasarkan jumlah pengunjung.

Tahun	2001 (Rp)	2002 (Rp)	2003 (Rp)	2004 (Rp)	2005 (Rp)
Pengging	49.307.200	71.489.600	86.493.000	63.206.000	61.374.000
Tlatar	72.766.400	134.366.400	209.077.000	144.134.000	135.287.000
Wana west Telawa	28.372.800	7.796.800	70.362.000	10.016.000	23.745.000
Makam Yosodipuro	4.264.500	5.838.500	8.330.400	9.379.200	9.258.400
Waduk Cengklik	1.943.000	2.668.000	4.262.400	2.238.400	2.205.600
Arga Merapi Merbabu	1.761.000	3.035.000	6.284.800	5.257.600	3.924.400
Gunung Tugel	1.435.000	1.652.500	2.795.200	1.660.800	2.180.800
Makam Pantaran	1.332.000	1.412.500	2.569.600	0	1.184.000
Jumlah	161.181.900	228.319.300	390.624.700	235.892.000	239.161.200

Sumber: Dinas Pariwisata diolah

Tabel

Kontribusi penerimaan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah

Tahun	Realisasi penerimaan Pajak Daerah (Rp)	Total Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Kontribusi (%)
2001	2,989,750,308	17,675,166,587	16.91
2002	4,334,366,200	24,460,325,825	17.72
2003	5,820,775,186	32,781,305,308	17.76
2004	7,244,100,746	36,970,682,467	19.59
2005	6,984,060,197	49,816,906,083	14.02

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah diolah

Tabel

Kontribusi Penerimaan laba BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Boyolali

Tahun	Realisasi Penerimaan laba BUMD (Rp)	Total Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Kontribusi (%)
2001	269,596,000	17,675,166,587	1.53
2002	315,514,668	24,460,325,825	1.29
2003	337,290,049	32,781,305,308	1.03
2004	515,467,923	36,970,682,467	1.39
2005	3,426,513,217	49,816,906,083	6.88

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah diolah

LAMPIRAN 7
DAFTAR TABEL-TABEL

Tabel
Realisasi Pajak Daerah dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2005

No	Jenis Pajak	Tahun 2001 (Rp)	Tahun 2002 (Rp)	Tahun 2003 (Rp)	Tahun 2004 (Rp)	Tahun 2005 (Rp)
1	Pajak Hotel dan Restoran	117.696.065	122.553.160	130.088.364	130.582.100	142.191.700
2	Pajak Hiburan	8.517.100	8.555.550	10.005.050	10.243.600	5.348.300
3	Pajak Reklame	12.883.759	72.000.000	72.000.000	72.200.000	123.182.900
4	Pajak Penerangan Jalan	2.668.185.420	3.942.989.772	5.564.355.016	6.959.690.096	6.570.434.557
5	Pajak Bahan Galian Golongan C	34.525.027	37.045.210	43.879.256	71.384.950	142.082.650
6	Pajak ABT/APT	147.942.937	151.033.608	0	0	0
7	Pajak Kendaraan tidak Bermotor	0	189.500	447.500	0	0
8	Pajak Parkir	0	0	0	0	820.000
	Jumlah Pajak Daerah	2.989.750.308	4.334.366.800	5.820.775.186	7.244.100.746	6.984.060.197

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah diolah

Tabel
Realisasi laba BUMD dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2005

No	Jenis BUMD	Tahun 2001 (Rp)	Tahun 2002 (Rp)	Tahun 2003 (Rp)	Tahun 2004 (Rp)	Tahun 2005 (Rp)
1	PDAM	80.000.000	100.000.000	54.943.799	150.000.000	225.000.000
2	Perusahaan Daerah Aneka Karya	34.000.000	42.500.000	46.000.000	44.284.358	96.576.225
3	PD. BPR Bank Pasar	82.100.000	107.593.000	148.994.250	244.271.750	323.084.500
4	PD. BPR BKK	73.496.000	65.421.668	87.352.000	76.911.865	93.852.492
5	Laba Atas Penyertaan Modal	0	0	0	0	2.688.000.000

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah diolah

Tabel
Realisasi Pendapatan Asli Daerah dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2005

No	Jenis Pendapatan	Tahun 2001 (Rp)	Tahun 2002 (Rp)	Tahun 2003 (Rp)	Tahun 2004 (Rp)	Tahun 2005 (Rp)
1	Pajak Daerah	2.989.750.308	4.334.366.800	5.820.775.186	7.244.100.746	6.984.060.197
2	Retribusi Daerah	12.454.462.899	15.265.694.973	20.189.284.372	25.189.617.742	34.579.914.970
3	Bagian laba BUMD	269.596.000	311.686.188	337.290.049	515.467.923	3.426.513.217
4	Lain-lain PAD yang sah	1.961.357.380	4.548.577.864	6.433.955.701	4.021.496.056	4.826.417.699
		17.675.166.587	24.460.325.825	32.781.305.308	36.970.682.467	49.816.906.083

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah diolah



PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
(KESBANG DAN LINMAS)
Jalan Jambu Nomor 59 Telpn (0276) 321087 Boyolali 57311

PEMBERIAN SURAT REKOMENDASI IJIN KKN, RISET
PENELITIAN DAN SURVEY

NOMOR : 070 / 267 / X / 27 / 2006

- I. DASAR : - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 30 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Administrasi Untuk Mendapatkan Legalitas Naskah Dinas.
- Surat Keputusan Bupati Boyolali Nomor 505 Tahun 2001 tentang Rekomendasi Pemberian Ijin KKN, Riset, Penelitian, dan Survey.
- II. MENARIK : 1. Surat dari Universitas Sanata Dharma Yogyakarta Nomor 31 / Kaprodi Akt /274/X/2006 tanggal 5 Oktober 2006
- III. Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Boyolali menyatakan tidak keberatan atas pelaksanaan Penelitian dalam wilayah Kabupaten Boyolali yang dilaksanakan oleh :
1. Nama / NIM : Arif Nugroho Rahman / 0221141132
 2. Alamat : Malang RT 05/05 Tanduk Ampel Boyolali
 3. Pekerjaan : Mahasiswa Sanata Dharma Yogyakarta
 4. Penanggung jawab : Ir. Hansidi Yuli Hartanto, Msi. Akt
 5. Maksud dan Tujuan : Mengadakan Penelitian dengan judul : " ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK DAERAH DAN LABA PADA KABUPATEN BOYOLALI "
 6. Lokasi : 1. Kantor Dipenda Kabupaten Boyolali
2. Kantor BPS Kabupaten Boyolali
 7. Peserta :
- Dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut ;
- a. Mentaati segala Peraturan yang berlaku.
 - b. Pelaksanaan Penelitian tidak disalah gunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu ketertiban umum dan stabilitas Pemerintahan.
 - c. Sebelum pelaksanaan dimaksud, maka yang bersangkutan harus terlebih dahulu melaporkan kepada Penguasa Daerah setempat.
 - d. Setelah pelaksanaan selesai supaya menyerahkan laporan hasil kegiatan kepada Bupati Boyolali Cq. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Boyolali.
- IV. Surat Rekomendasi yang berlaku :
- | | | | | |
|-----------------|----------------|----------------|-------------|---------------|
| 1. Lama | : dari | 7 Oktober 2006 | s/d tanggal | 7 Jnauri 2006 |
| 2. Perpanjangan | : dari tanggal | - | s/d tanggal | - |

Dikeluarkan di : BOYOLALI
Pada tanggal : 7 Oktober 2006

TEMBUSAN Kepada Yth :

1. Bupati Boyolali, sebagai laporan;
2. Dandim 0724 Boyolali;
3. Kapolres Boyolali;
4. Kepala Bappeda Kab. Boyolali;
5. Kabag Hukum Setda Kab.Boyolali;
6. Kabag Perkonomian Setda Kab.Boyolali;
7. Kepala PDAM Boyolali;
8. Kepala Bank Pasar Kab.Boyolali;
9. Kepala BKK Kab.Boyolali
10. Kepala Perusda Aneka Karya Kab.Boyolali
11. Yang bersangkutan;
12. Pertinggal.

A.N. BUPATI BOYOLALI
KEPALA KANTOR KESBANG DAN LINMAS
Ub. Kasr. Kebangsaan



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : ARIF NUGROHO RACHMAN
Nama Panggilan : ARIF
Tempat Tanggal Lahir : WONOGIRI, 7 SEPTEMBER 1984
Alamat : Ds. Malangan, Ds. Tanduk, Kec. Ampel, Kab. Boyolali

Pendidikan :

1. Taman Kanak-kanak : TK Pertiwi Tanduk 1 Ampel Boyolali
Tahun : 1990/1991
2. Sekolah Dasar : SD Negeri Tanduk 1 Ampel Boyolali
Tahun : 1995/1996
3. Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama : SLTP Negeri 7 Salatiga
Tahun : 1998/1999
4. Sekolah Menengah Umum : SMU Kristen 1 Salatiga
Tahun : 2001/2002

